

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2026

User
[COMPANY NAME]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. Renja OPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar dapat menentukan prioritas pembangunan kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga, dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Amien.

Purbalingga, Desember 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA



dr. JUST FEBRIANTO, MPH
Pembina Tk I
NIP. 19700219 200212 1 004

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.3 Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	79
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	80
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	109
2.6 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja.....	118
BAB III.....	119
6.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	119
6.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	123
6.3 Program dan kegiatan Perangkat Daerah	124
BAB IV.....	131
BAB V.....	178

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah untuk menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam proses penyusunan dokumen Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga berpedoman pada RKPD Kabupaten Purbalingga dan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi da pagu indikatif tahun berjalan serta prakiraan maju anggaran tahun depan.

Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran operasional tahunan dari Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, Renja juga disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Purbalingga, sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah tahunan. Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan sebagai dokumen penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah dan perencanaan tahunan daerah.

Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Tujuan Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk mendukung kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif, serta peningkatan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya dapat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Arah pembangunan kesehatan Kabupaten Purbalingga secara umum adalah terselenggaranya program pembangunan kesehatan yang mendukung tercapainya Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi :

1. Misi 1 : Bangkitkan Ekonomi Rakyat
2. Misi 2 : Akselerasi Pembangunan Insfraktuktur Berkelanjutan
3. Misi 3 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
4. Misi 4 : Unggulkan kualitas Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh misi kabupaten utamanya misi keempat yaitu *“Unggulkan kualitas Sumber Daya Manusia”* maka Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan paripurna. Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku di jajaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non pemerintah serta masyarakat secara profesional dan

bertanggungjawab termasuk penyediaan sumber daya kesehatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana selama satu tahun anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga adalah Menjabarkan Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan; Menjamin keselarasan program dan kegiatan dengan RKPD; Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan; Menjadi dasar penyusunan RKA dan RAPBD; Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; Menjadi dasar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Tahun 2026:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja Tujuan dan Sasaran

Hingga akhir tahun 2024, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun perbandingan capaian indikator kerja utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

TAHUN 2023					TAHUN 2024						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	73,98	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	74	74,19	100,26
	Meningkatnya implementasi SAKIP Dinkes	Nilai SAKIP Dinkes	Nilai	73,51		Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	67,57	5,28	70,83
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	102,44			Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7,57	13,25	57,12

TAHUN 2023					TAHUN 2024						
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	14,03			Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1.000 KH	9,05	15,76	57,41
		Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1000 KH	16,63			Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,50	0,62	124
		Indikator Keluarga Sehat	%	0,44		Meningkatnya kapasitas sumber daya kesehatan	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk	Per 5000 penduduk	1,5	1,64	109,33
							Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	Per 100.000 KH	337,9	350,51	103,73
					Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinkes		Nilai kematangan perangkat daerah	Angka	39	40	102,57

1.02.01.2.01	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.01.01	Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.02.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang menerima gaji tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1450 orang	1457 orang	1705 orang	1705 orang	100%	1640 orang	1640 orang	100%
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54 dokumen	54 dokumen	54 dokumen	54 dokumen	100%	54 dokumen	54 dokumen	100%
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100%
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum dinas yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perundang-undangan yang terselesaikan disosialisasi	100%	100%	100%			100%	100%	100%
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 orang	36 orang	36 orang			36 orang	36 orang	100%
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	30 orang	30 orang			30 orang	30 orang	100%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase adminitrasi umum perangkat daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	100%	50 laporan	50 laporan	100%

		dan Konsultasi SKPD								
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	9 dokumen	100%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 unit	1 unit	3 unit	3 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen yang harus dikirim	100%	82,69%	100%	83,65%	83,65%	100%	100%	100%
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	2 laporan	20 laporan	3 laporan	15%	20 laporan	20 laporan	100%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	48 laporan	60 laporan	60 laporan	100%	60 laporan	60 laporan	100%
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan	24 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

		Kantor yang Disediakan								
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	39 unit	39 unit	39 unit	100%	39 unit	39 unit	100%
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Status Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya	55,93%	89,47%	52,54%	94,91%	180,64%	100%	100%	100%
		Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	2,30 per 100000 penduduk	2,15 per 100000 penduduk	2,25 per 100000 penduduk	2,12 per 100000 penduduk	94,22%	2,25 per 100000 penduduk	2,25 per 100000 penduduk	100%
		Prevalensi Stunting (data EPPGBM)	13,6%	11,58%	14%	11,34%	123,46%	11%	11%	100%
		Angka Morbiditas	17,1%	23,23%	18,1%	18,78%	96,37%	17,6%	17,6%	100%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitas pelayanan primer	100%	100%	100%	95,65%	95,65%	100%	100%	100%

		Presentase Puskesmas dan Rumah Sakit ketersediaan sarapas, alkes sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio Puskesmas dan Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	3,3 per 100000 penduduk	2,12 per 100000 penduduk	3,2 per 100000 penduduk	3,11 per 100000 penduduk	97,19%	3,3 per 100000 penduduk	3,3 per 100000 penduduk	100%
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 unit	N/A	1 unit	1 unit	100%	N/A	N/A	N/A
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	1 unit	100%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	260 unit	126 unit	13 unit	13 unit	100%	191 unit	191 unit	100%
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25 unit	N/A	66 unit	60 unit	90,91%	2 unit	2 unit	100%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di	N/A	1 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%

		kesehatan sesuai standar								
		Cakupan puskesmas yang telah menerapkan K3 internal Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Desa ODF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan kasus KIPI yang yang diinvestigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16214 orang	11849 orang	10529 orang	10529 orang	100%	12114 orang	12114 orang	100%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16214 orang	12679 orang	11546 orang	11546 orang	100%	11781 orang	11781 orang	100%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14589 Bayi	12513 orang	11545 orang	11545 orang	100%	11648 orang	11648 orang	100%

1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58.681 Balita	55129 orang	52820 orang	52820 orang	100%	52578 orang	52578 orang	100%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141976 Anak	141975 orang	141976 orang	141976 orang	100%	140225 orang	140225 orang	100%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	604136 orang	637309 orang	669907 orang	669907 orang	100%	669907 orang	669907 orang	100%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114718 orang	112334 orang	154605 orang	154605 orang	100%	131773 orang	131773 orang	100%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268926 orang	195979 orang	225689 orang	225689 orang	100%	236224 orang	236224 orang	100%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268926 orang	13114 orang	19124 orang	19124 orang	100%	14017 orang	14017 orang	100%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2471 Orang	2507 orang	2637 orang	2637 orang	100%	2634 orang	2634 orang	100%

1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10206 orang	13208 orang	14112 orang	14112 orang	100%	14086 orang	14086 orang	100%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17207 orang	17831 orang	17490 orang	17490 orang	100%	15076 orang	15076 orang	100%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 dokumen	6 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	111 dokumen	482%	23 dokumen	23 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	138 orang	138 orang	138 orang	138 orang	100%	138 orang	138 orang	100%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	890 orang	890 orang	890 orang	27 orang	3,03%	890 orang	890 orang	100%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	15 dokumen	15 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	560 paket	560 paket	560 paket	681 paket	121,61%	560 paket	560 paket	100%
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9 dokumen	9 dokumen	8 dokumen	9 dokumen	112,5%	9 dokumen	9 dokumen	100%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	23 dokumen	23 dokumen	22 dokumen	22 dokumen	100%	23 dokumen	23 dokumen	100%

1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	54 unit	54 unit	54 unit	54 unit	100%	54 unit	54 unit	100%
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	54 unit	54 unit	54 unit	54 unit	100%	54 unit	54 unit	100%
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM	Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan yang mendapatkan ijin praktek	82%	88,77%	81%	91,175	112,56%	92%	92%	100%
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian PerizinanPraktik Tenaga Kesehatan	100 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	100%	150 dokumen	150 dokumen	100%

1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	100%	150 dokumen	150 dokumen	100%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan RSUD dan Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	250 orang	71 orang	50 orang	0	0	50 orang	50 orang	100%
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 dokumen	264 dokumen	200 dokumen	200 dokumen	100%	200 dokumen	200 dokumen	100%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikasi tenaga kesehatan	95%	98,24%	92%	92%	100%	93%	93%	100%
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan	189 orang	250 orang	189 orang	221 orang	116,93%	189 orang	189 orang	100%

	Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Indikator lama)								
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	92 dokumen	200	150 dokumen	150 dokumen	100%	92 dokumen	92 dokumen	100%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil pemeriksaan post market yang ditindaklanjuti (Indikator lama)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	154 unit	93 unit	93 unit	93 unit	100%	154 unit	154 unit	100%

01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa / Kelurahan Sehat Mandiri	30,17%	33,4%	28,03%	37,7%	134,5%	41,1%	41,1%	100%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	13 dokumen	36 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100%	13 dokumen	13 dokumen	100%
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan RT yang ber PHBS	100%	92,20%	88%	94,7%	107,6%	100%	100%	100%
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa sehat mandiri	30,17%	33,4%	28,03%	37,7%	134,5%	41,1%	41,1%	100%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	3 dokumen	15 dokumen	65 dokumen	65 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%

Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100 %
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Kegiatan Evaluasi program Bangsa Kencana yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100 %
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Cetak Buku Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Tersusunnya Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana	30 buku, 1 dokumen	30 buku, 1 dokumen	30 buku, 1 dokumen	30 buku, 1 dokumen	100%	30 buku, 1 dokumen	30 buku, 1 dokumen	100 %

Pemetaan Kependudukan	Jumlah monitoring evaluasi Sistem dan Informasi Keluarga yang terlaksana	18 kec	18 kec	18 kec	18 kec	100%	18 kec	18 kec	100 %
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah monitoring evaluasi Sistem dan Informasi Keluarga yang dilaksanakan	18 kec	18 kec	18 kec	18 kec	100%	18 kec	18 kec	100 %
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana yang di susun.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100 %
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	9 persen	9 persen	9 persen	9 persen	100%	9 persen	9 persen	100 %

<p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>	<p>Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB</p>	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100 %
<p>Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p>	<p>Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mengikuti sosialisasi program KKBPK Jumlah stakeholders dan mitra kerja yang mengikuti sosialisasi program KKBPK</p>	18 kec, 239 desa/kel.	18 kec, 239 desa/kel.	18 kec, 239 desa/kel.	18 kec, 239 desa/kel.	100%	18 kec, 239 desa/kel.	18 kec, 239 desa/kel.	100 %
<p>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>	<p>Jumlah KIE yang dilaksanakan di wilayah</p>	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	100%	10 lokasi	10 lokasi	100 %

Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah media KIE yang dibuat dan di distribusikan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100 %
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media promosi KIE yang digunakan	3 media	3 media	3 media	3 media	100%	3 media	3 media	100 %
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Kegiatan Harganas yang dilaksanakan	1 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100 %
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluh yang difasilitasi pengelolaan dan pemeliharaannya	18 balai penyuluh	18 balai penyuluh	18 balai penyuluh	18 balai penyuluh	100%	18 balai penyuluh	18 balai penyuluh	100 %

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	Jumlah faskes, akseptor MOW dan akseptor MOP yang difasilitasi alat dan obat kontrasepsi	42 faskes	42 faskes	42 faskes	42 faskes	100%	42 faskes	42 faskes	100 %
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah peserta KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan MKJP yang difasilitasi	10 org	10 org	10 org	10 org	100%	10 org	10 org	100 %
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 kec, 14 PKB	5 kec, 14 PKB	5 kec, 14 PKB	5 kec, 14 PKB	100%	5 kec, 14 PKB	5 kec, 14 PKB	100 %

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah penduduk usia subur yang mengikuti pembinaan KB dan KR	1512 org	1512 org	1512 org	1512 org	100%	1512 org	1512 org	100 %
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase mitra kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	60%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100 %
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra	Jumlah mitra kerja yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan	5 mitra	5 mitra	5 mitra	5 mitra	100%	5 mitra	5 mitra	100 %

Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	dan pembinaan kesertaan ber-KB								
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang dikelola melalui program KKBPK	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELAURGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga mengikuti UPPKS	13.61 Persen	13.61 Persen	13.61 Persen	13.61 Persen	13.61 Persen	13.61 Persen	13.61 Persen	100 %
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tingkat keluarga sejahtera	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100 %

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPMKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPMKS)	Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan	30 desa	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100 %
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPMKS, PIK-R dan	Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan	18 kec, 180 kader	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100 %
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPMKS)									

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kader yang mengikuti pelatihan Jumlah Orang tua yang mengikuti Sosialisasi Program Orang Tua Hebat dan Siswa yang mengikuti sosialisasi Genre Jumlah Orang tua yang mengikuti Sosialisasi Program Orang Tua Hebat dan Siswa yang mengikuti sosialisasi Genre	18 kec, 540 org	36 Kampung KB	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100%	36 Kampung KB	36 Kampung KB	100 %
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	60%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	100 %

Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Mitra yang mengikuti sosialisasi Program Genre	50 remaja PBG	50 remaja PBG	50 remaja PBG	50 remaja PBG	100%	50 remaja PBG	50 remaja PBG	100 %
Pemantauan data dan informasi Kelaurga berresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu hamil,Pasca persalinan/kelahiran,baduta/balita)	Jumlah Data dan informasi keluarga beresiko stunting yang di himpun oleh Balai Penyuluhan KB	18 Kec	18 Kec	18 Kec	18 Kec	100%	18 Kec	18 Kec	100%
Pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja clon pengantin/Calon PUS,Ibu hamil,Pasca persalinan/kelahiran,baduta/balita)	Jumlah Tim Pendamping Keluarga yang ada di kab.purbaingga	2307 orang	2307 orang	2307 orang	2307 orang	100%	2307 orang	2307 orang	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	74	74,19	100,26%
		Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	67,57	95,28	70,83%
			Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	7,57	13,25	57,12%
			Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1000 KH	9,05	15,76	57,41%
			Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,50	0,62	124%
		Meningkatnya kapasitas sumber daya kesehatan	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk	Per 5000 penduduk	1,50	1,64	109,33%
			Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	Per 100.000 penduduk	337,9	350,51	103,73%
	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana	TFR		2,01	2,01	100
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan DINKES		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	39	40	102,57%
		Meningkatnya implementasi	Nilai SAKIP DINKES	Angka	73,6	73,81	100,29%

		SAKIP DINKES					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan I: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Merujuk kepada sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 kemudian menjadi tujuan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Usia Harapan Hidup.

Usia harapan Hidup sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kualitas lingkungan, kualitas Pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Meningkatnya usia harapan hidup kemudian dapat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Usia Harapan Hidup mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat dimana mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.

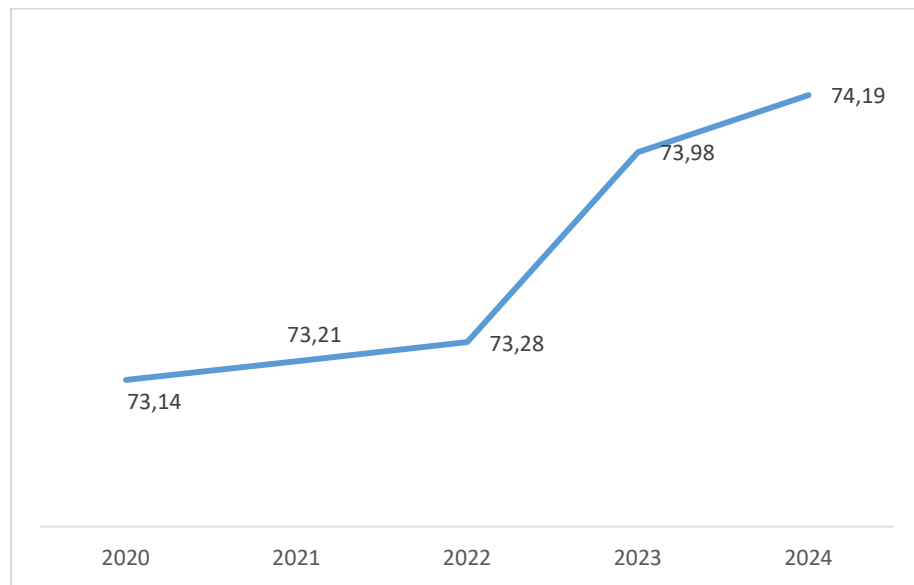
Hasil evaluasi tujuan strategis meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mendapatkan capaian kinerja sebesar 100,26% dengan kategori Sangat Tinggi.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 mencapai 74,19 tahun dari target yang ditetapkan yaitu 74 tahun dengan capaian kinerja 100,26% hal ini dapat dikatakan capaian kinerja Tujuan strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berada di kriteria **Sangat Tinggi**.

Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama tahun 2020 hingga 2024 terjadi peningkatan UHH sebesar 1,05 tahun. Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2024 menjadi 74,19 tahun, yang artinya pada tahun 2024 rata-rata umur bayi baru lahir diperkirakan akan hidup hingga 74,19 tahun. Capaian Kinerja jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 100,94%. Tetapi jika dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah masih berada dibawah capaian Usia Harapan Hidup yaitu 74,91, namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yaitu 74,15 tahun.

Tren Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Purbalingga selama lima tahun dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Usia Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Faktor yang menjadi kendala UHH Kabupaten Purbalingga lebih rendah dibandingkan dengan UHH Provinsi di antaranya:

a. Sarana prasarana kesehatan

Jumlah Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Purbalingga sebanyak 22 unit yang terdiri dari Puskesmas Non Rawat Inap 11 unit dan Puskesmas Rawat Inap 11 unit. Pada tahun 2021 telah terbangun satu Puskesmas baru di Kecamatan Kemangkon, namun Puskesmas tersebut masih dalam tahap pemenuhan perijinan operasional dan pemenuhan sarana dan prasarananya. Sebagai dukungan terhadap pemerataan akses pelayanan kesehatan masyarakat di beberapa kecamatan terdapat puskesmas pembantu yang berjumlah 48 unit dan puskesmas keliling yang berjumlah 22 unit.

Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebanyak 1.053.565 jiwa berarti 1 Puskesmas beserta jaringannya rata-rata melayani penduduk sebanyak 47.889 jiwa, atau rasionya adalah 2,1/100.000 penduduk. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa rasio penduduk untuk setiap Puskesmas sebesar 1:30.000 penduduk maka untuk mencapai target tersebut berdasarkan jumlah penduduk tahun 2024 Kabupaten Purbalingga masih kekurangan 13 unit Puskesmas baru untuk mencapai kondisi ideal. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah Puskesmas seperti pembangunan Puskesmas baru maupun peningkatan status Puskesmas pembantu menjadi Puskesmas induk.

b. Banyaknya penduduk miskin

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 14,18%. Penduduk miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap Pendidikan dan informasi kesehatan, sehingga kurang mampu untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan yang diperlukan.

c. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kesehatan maternal di suatu wilayah. Pada tahun 2024, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga mencapai 95,28 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga yaitu 67,57 per 100.000 kelahiran hidup. Hal tersebut mencerminkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga termasuk tinggi.

Kendala tersebut menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam hal ini beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Usia Harapan Hidup yaitu:

a. Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pencegahan terhadap penyakit, pemulihan kesehatan, pengobatan dan keperawatan serta kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan.

Berikut ini merupakan persebaran layanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai berikut:

Layanan Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

URAIAN	2024
1	2
Rumah Sakit Umum	7
Rumah Sakit Bersalin	0
Rumah Sakit Ibu dan Anak	2
Klinik Utama	2
Klinik Pratama	22
Puskesmas rawat inap	11
Puskesmas non rawat inap	11
Puskesmas pembantu	48
Puskesmas keliling	22
PKD	191
Posyandu	1240
Posyandu lansia	764
Apotek	111
Laboratorium	3

b. Persebaran Tenaga Kesehatan

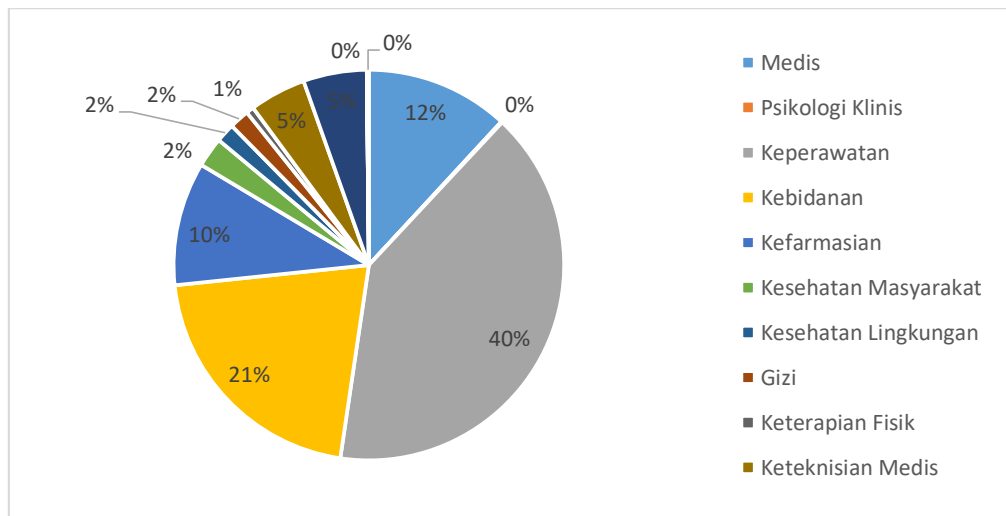
Untuk mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan telah dilakukan pemenuhan kebutuhan dengan menempatkan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten baik sebagai ASN, Pegawai Tidak tetap dan Tenaga honor daerah.

Berikut persebaran tenaga kesehatan menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

Persebaran Tenaga Kesehatan berdasarkan jenisnya
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Jenis Ketenagaan	Jumlah
1	2	3
1	Medis	432
2	Psikologi Klinis	3
3	Keperawatan	1469
4	Kebidanan	764
5	Kefarmasian	372
6	Kesehatan Masyarakat	90
7	Kesehatan Lingkungan	57
8	Gizi	60
9	Keterapian Fisik	23
10	Keteknisian Medis	170
11	Teknik Biomedika	191
12	Kesehatan Tradisional	0
13	Nakes Lainnya	6
Jumlah		3637

Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2024

1) Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk

Jumlah tenaga dokter spesialis di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sejumlah 182 orang dengan rasio perbandingan dokter spesialis sebesar 17,27 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh

17 orang dokter spesialis. Rasio tersebut sudah sesuai target Indonesia Sehat sebesar 6 per 100.000 penduduk.

2) Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk

Jumlah tenaga dokter umum yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sejumlah 213 orang dengan rasio perbandingan tenaga dokter umum sebesar 20,22 per 100.000 penduduk. Artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 20 orang dokter umum. Rasio tersebut masih jauh di bawah target Indonesia Sehat sebesar 40 per 100.000 penduduk.

Rasio Dokter Umum dan Dokter Spesialis Terhadap Jumlah Penduduk

Uraian	2024
1	2
Jumlah Dokter Umum	213
Jumlah Dokter Spesialis	182
Jumlah Penduduk	1.053.565
Rasio Dokter Umum (per 100.000 penduduk)	20,22
Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)	17,27

c. Pelaksanaan program Integrasi Pelayanan Primer (ILP)

Integrasi Pelayanan Primer (ILP) merupakan salah satu dari enam pilar transformasi bidang kesehatan di Indonesia. Integrasi Pelayanan Primer menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2015 tahun 2023 adalah sebuah upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai Pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan Pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perorangan, keluarga, dan masyarakat. Tujuan ILP untuk mendekatkan akses dan Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat. Kabupaten Purbalingga sudah melaksanakan Integrasi Pelayanan Primer (ILP) di 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Purbalingga.

d. Pelaksanaan program pembangunan kesehatan

Pelaksanaan fisik program pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dalam meningkatkan akses dan kualitas terhadap

pelayanan kesehatan diantaranya melakukan rehabilitasi pada Puskesmas Kemangkon II. Peningkatan sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan pengadaan ambulance untuk Puskesmas Bukateja, Puskesmas Kemangkon, Puskesmas Mrebet, Puskesmas Pengadegan, Puskesmas Kalikajar. Pengadaan mobil siaga yang diserahkan ke Desa Bantarbarang, Desa Candiwulan, Desa Sumingkir, Desa Karangpucung, Desa Kedungbenda. Beserta pengadaan alat kesehatan yaitu *Cold Storage*.

e. Pelaksanaan program sosial khususnya kesehatan lingkungan

Program sosial terutama dalam bidang kesehatan lingkungan, bertujuan untuk menyediakan sarana sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga telah melakukan stimulan jamban yaitu bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun jamban sehat kepada 50 Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga, hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi dan kesehatan masyarakat.

f. Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin

Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, memiliki akses yang setara dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui JKN. Seiring dengan program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang tercakup oleh Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 1.052.030 atau 99,85% dari total penduduk 1.053.565 jiwa. Dari jumlah tersebut, 734.857 atau 69,85% merupakan peserta JKN bagi penduduk miskin. Realisasi tersebut sesuai dengan target capaian *Universal Health Coverage (UHC)* yaitu minimal 95% dari jumlah penduduk.

Kepsertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Uraian	2024
1	2
BPJS	1.052.030
a. BPJS PBI	734.857
b. BPJS Non PBI	317.173

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperluas kebijakan jaminan perlindungan kesehatan dari penduduk miskin menjadi seluruh penduduk miskin Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target *Universal Health Coverage* (UHC). Anggaran JKN yang dibayarkan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.22.622.544.000,-, yang terdiri dari pembayaran PBI APBD sebesar Rp.21.110.544.000,- dan Rp.1.512.000.000,- untuk membayar bantuan iuran JKN peserta PBU dan BP kelas 3. Capaian UHC pada akhir tahun 2024 sebesar 99,85% dari total penduduk di Kabupaten Purbalingga, dimana 77,43% diantaranya adalah peserta aktif.

Berikut ini merupakan kepesertaan JKN tahun 2024 berdasarkan jenis kepesertaannya:

Kepesertaan JKN Berdasarkan Jenis Kepesertaannya Tahun 2024

Jenis Kepesertaan	2024
1	2
PBI APBN	651.681
PBI APBD dinkes	83.176
Bukan Pekerja	19.328
Pekerja Bukan Penerima Upah	91.532
Pekerja Penerima Upah Badan Usaha	155.613
Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara	50.700

g. Penanganan Angka Kematian Ibu (AKI)

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menurunkan Angka Kematian Ibu diantaranya Coffee Morning Penurunan AKI AKB, Pertemuan bidan dengan pokok bahasan yang berbeda dalam rangka refreshing pengetahuan terkait program, refreshing kegawatdaruratan maternal dan neonatal, AMP internal di fasyankes dan Rumah Sakit.

h. Pelaksanaan GERMAS

Salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengadakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Tujuan GERMAS diantaranya menurunkan risiko penyakit menular dan tidak menular yang menimbulkan kematian maupun kecacatan, menghindari terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit. GERMAS dimulai dengan 3 fokus kegiatan yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka GERMAS adalah:

- 1) Peningkatan aktivitas fisik
- 2) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 3) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
- 4) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
- 5) Peningkatan kualitas lingkungan
- 6) Peningkatan edukasi hidup sehat

2. Sasaran I: Menurunnya Angka Morbiditas dan Mortalitas

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, indikator kinerja menurunnya angka morbiditas dan mortalitas yaitu : Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), dan Indeks Keluarga Sehat.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

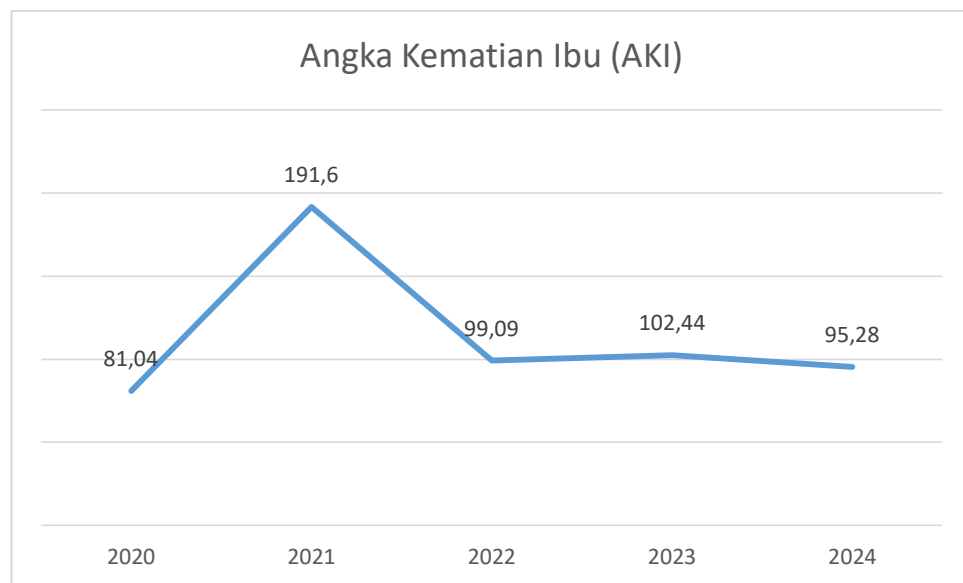
Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi oleh seorang ibu selama masa kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pengguna fasilitas Pelayanan kesehatan termasuk Pelayanan prenatal dan obstetri.

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 95,28 per 100.000 kelahiran hidup dengan 11 kasus kematian ibu. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 67,57 per 100.000 kelahiran hidup maka capaian Angka Kematian Ibu hanya mencapai 70,83% dan termasuk dalam kategori **Sedang**. Namun capaian ini lebih tinggi dari tahun lalu dengan angka kematian ibu 102,44 per 100.000 kelahiran hidup.

Capaian AKI di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami tren yang fluktuatif, dimana AKI mengalami kenaikan pada tahun 2021 dikarenakan masih berstatus pandemic covid, terjadi kenaikan capaian AKI pada tahun 2023 dikarenakan terjadi penurunan jumlah kelahiran hidup dari tahun 2022 ke 2023 tetapi jumlah kasusnya sama. Capaian kinerja jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 70,83% dengan target masa akhir Renstra adalah 67,57 per 100.000 kelahiran hidup.

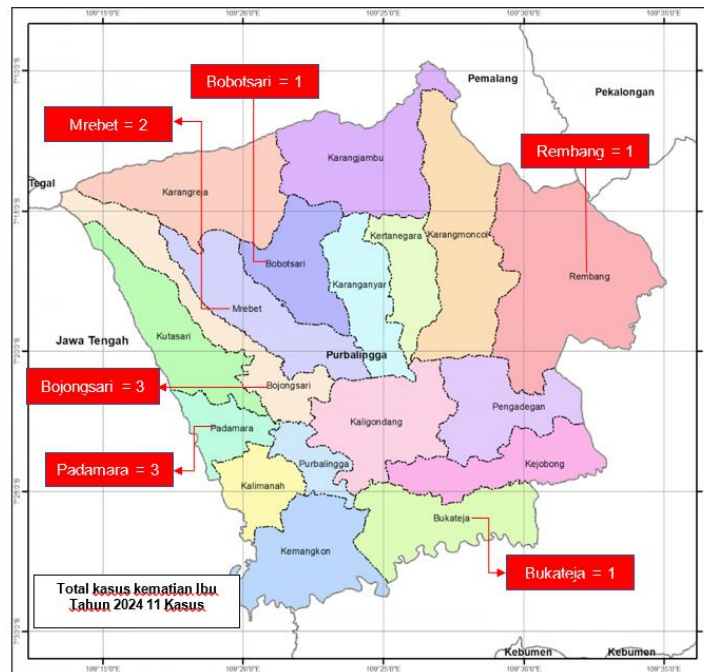
Tren capaian AKI di Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Tren Angka Kematian Ibu
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Kasus kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebanyak 11 kasus menempati posisi ke sepuluh kasus kematian ibu tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sebaran kasus kematian ibu di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Peta Sebaran Kasus Kematian Ibu Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

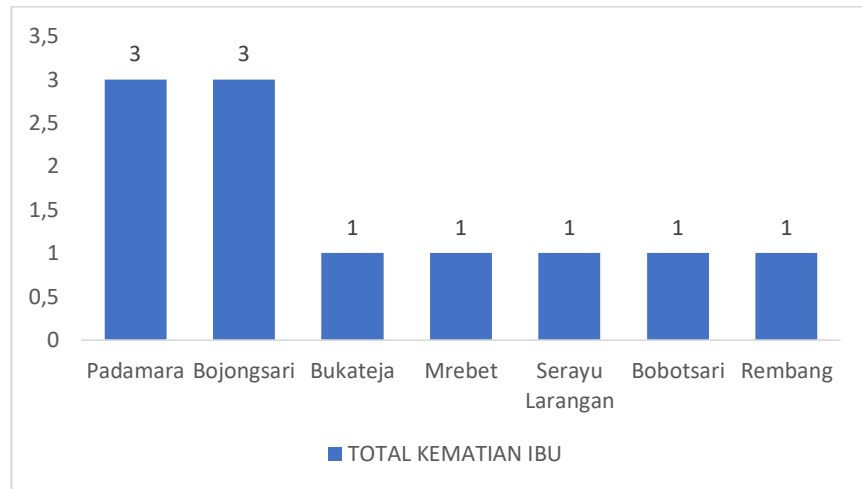


Kabupaten Purbalingga memiliki 18 Kecamatan. Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Padamara merupakan kecamatan dengan penyumbang kasus kematian ibu, yaitu sebanyak tiga kasus kematian.

Kabupaten Purbalingga memiliki 22 Puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah kematian ibu terdapat di Puskesmas Bojongsari dan Puskesmas Padamara sebanyak masing-masing 3 kasus. Puskesmas dengan catatan 1 kasus kematian yaitu Puskesmas Bukateja, Puskesmas Mrebet, Puskesmas Serayu Larangan, Puskesmas Bobotsari, Puskesmas Rembang dan sisanya tidak ada kasus kematian.

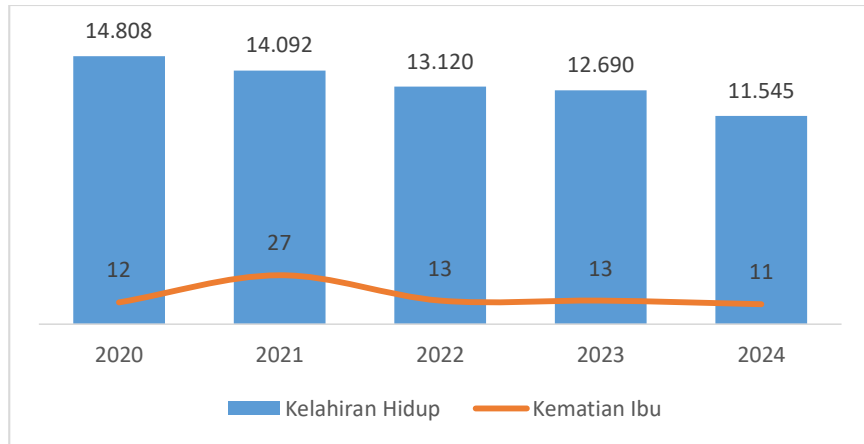
Penyebab kematian ibu adalah perdarahan 4 kasus, jantung 3 kasus, PEB/Eklampsia 2 kasus, penyakit TBC 1 kasus dan DBD 1 kasus. Tempat kematian 11 di Rumah Sakit. Sebanyak 9 kasus meninggal di Rumah Sakit di Purbalingga dan 2 kasus meninggal di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Total Kematian Ibu Berdasarkan Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Kasus kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 masih tergolong tinggi di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga sampai saat ini masih menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah dalam penanganannya secara komprehensif melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga. Tren kasus kematian ibu dan kelahiran hidup di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Tren Kasus Kematian Ibu dan Kelahiran Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Berdasarkan grafik diatas diketahui jumlah kasus kematian ibu tertinggi di tahun 2021 yaitu sebanyak 27 kasus. Kematian di tahun 2021 sebagian besar disebabkan oleh infeksi COVID-19, penyebab utama selain COVID-19 adalah Hipertensi dalam kehamilan. Tren kasus kematian ibu dari tahun 2022 hingga 2024 mengalami penurunan hal ini berbanding lurus dengan jumlah kelahiran hidup yang menurun setiap tahunnya.

Beberapa kendala yang dihadapi pada saat upaya penurunan Angka Kelahiran Ibu antara lain:

- 1) Masih ada kasus kematian ibu yang terjadi karena keterlambatan rujukan Rumah Sakit Non Ponek ke Rumah Sakit Ponek / Ponek Utama
- 2) Koordinasi internal Rumah Sakit untuk kasus ibu hamil risti masih terkotak kotak pada Pelayanan di masing-masing poli
- 3) Pembiayaan BPJS terbatas untuk 1 Pelayanan poli dalam 1 hari sehingga menghambat rujukan internal di Rumah Sakit
- 4) Rekomendasi AMPSR belum ditindaklanjuti secara optimal
- 5) Kurang peran aktif lintas sektor terhadap kegiatan penurunan kematian ibu, bayi dan balita, terutama tindak lanjut dari ditemukannya ibu hamil risti.
- 6) Peran Tim Pokja Penurunan AKI AKB belum optimal, karena tidak semua anggota tim berpartisipasi aktif saat pembahasan masalah
- 7) Adanya ibu hamil dan remaja putri yang tidak mengkonsumsi TTD

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penurunan Angka Kematian Ibu di antaranya sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya peningkatan Pelayanan di Tingkat RS dari semua lini dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakan diagnosa agar penggunaan manual rujukan lebih optimal
- 2) Perlu adanya review SOP untuk penanganan kasus yang melibatkan beberapa poli di RS
- 3) Perlu ada monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi AMPSR
- 4) Meningkatkan advokasi dan koordinasi terhadap lintas sektor terkait dengan kegiatan penurunan kematian Ibu, bayi dan balita
- 5) Penguatan komitmen peran dan tanggung jawab setiap anggota Tim Pokja Penurunan AKI AKB
- 6) Meningkatkan peran Masyarakat (kader dan tokoh masyarakat) dalam melakukan pendekatan kepada sasaran
- 7) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal Neonatal dengan sistem drill baik secara mandiri oleh faskes maupun pendampingan dari dokter spesialis dan tim
- 8) Meningkatkan sistem komunikasi dalam rujukan kasus gawat darurat
- 9) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang KIA, Kespro dan persiapan kehamilan kepada Remaja, PUS dan WUS baik di tingkat Kabupaten sampai ke Desa (RT/RW)
- 10) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas puskesmas mampu persalinan dan Poned
- 11) Meningkatkan capaian skrining layak ibu hamil pada semua Catin dan PUS dengan mengoptimalkan peran kader dalam berbagai pertemuan di tingkat desa
- 12) Melakukan skrining EKG pada semua ibu hamil dan hasil EKG dibaca oleh yang berkompeten
- 13) Pemeriksaan USG di Puskesmas untuk skrining, bukan untuk diagnostik
- 14) Ibu hamil dengan anemia dilakukan pemeriksaan tindak lanjut oleh dokter.

Strategi tersebut diimplementasikan dalam program kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya mencapai target indikator meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program yang bersifat langsung untuk menurunkan Angka Kematian Ibu adalah

program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di dalamnya ada kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP dengan sub kegiatan bertujuan untuk penurunan AKI di antaranya Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan ibu dan anak, Pelayanan jaminan kesehatan.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah bayi yang meninggal sebelum berusia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi digunakan untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

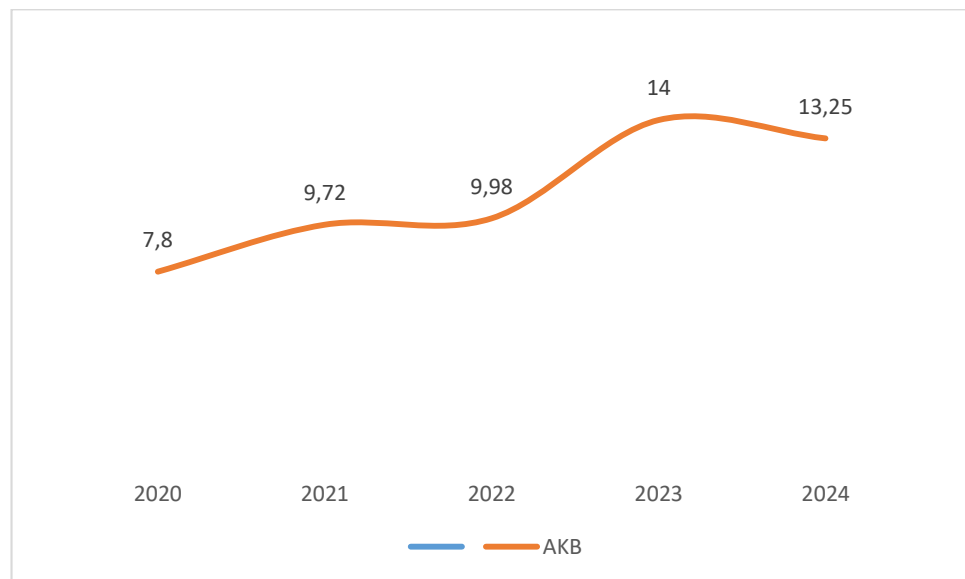
Angka kematian bayi di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 13,25 per 1.000 kelahiran hidup dengan 153 kasus kematian bayi. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 7,57 per 1.000 kelahiran hidup maka capaian Angka Kematian Bayi hanya mencapai 57,12% dan termasuk dalam kategori **Sedang**. Namun capaian ini lebih tinggi dari tahun lalu dengan angka kematian bayi 14,00 per 1.000 kelahiran hidup dengan kematian 178 kasus.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami tren yang fluktuatif, dimana AKB mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2023, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024. diketahui AKB tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan ekstrim terjadi pada tahun 2023, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain adanya perubahan metode pelaporan yaitu menggunakan sistem *Maternal Perinatal Death* (MPDN) yaitu sistem berbasis fasilitas Pelayanan kesehatan sehingga seluruh kematian bayi di fasyankes manapun akan ternotifikasi dan tercatat dalam sistem apabila orang tua memiliki KTP Kabupaten Purbalingga walaupun kematian terjadi di Kabupaten lain. Perbaikan pelaporan ini menyediakan data yang lebih akurat dan menyeluruh sehingga menyebabkan catatan kasus kematian bayi menjadi naik. Selain itu, kematian bayi yang naik dipengaruhi oleh naiknya kasus BBLR pada kelahiran bayi. Namun dari grafik

tren lima tahun terakhir terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu Angka Kematian Bayi menjadi 13,25 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah 153 kasus. Capaian kinerja jika dibandingkan dengan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 56,07% dengan target masa akhir Renstra adalah 7,43 per 1.000 kelahiran hidup.

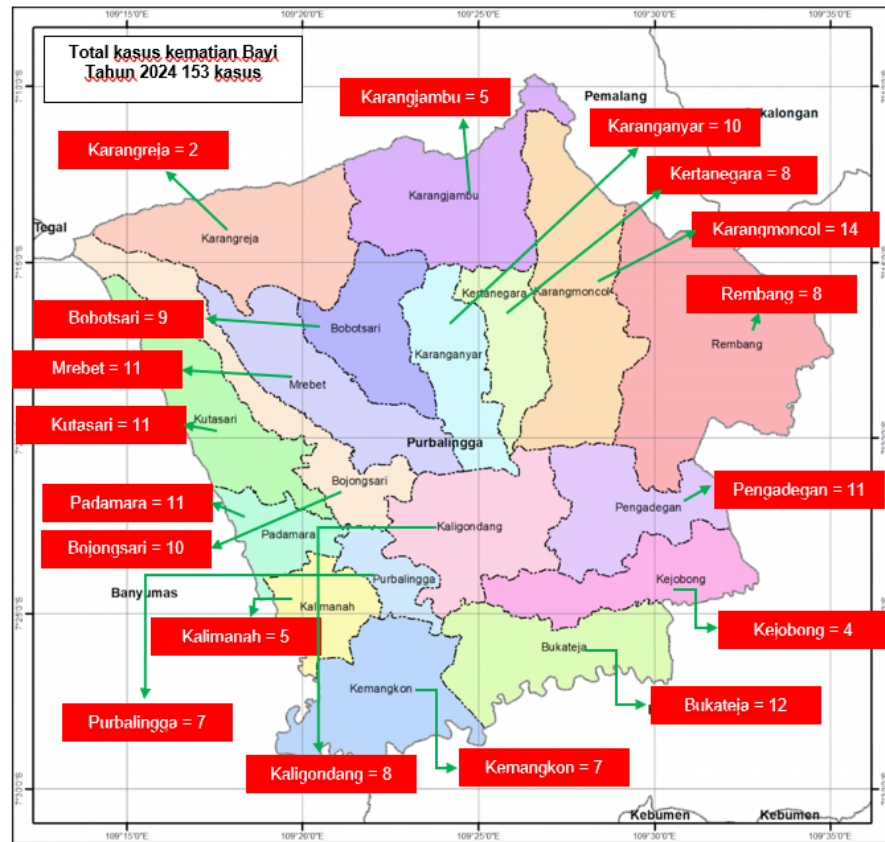
Tren capaian AKB di Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Tren Angka Kematian Bayi
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Kasus kematian bayi di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebanyak 153 kasus dengan jumlah kematian neonatal (0-28 hari) sebanyak 116 kasus dan kematian bayi (29 hari-11 bln) sebanyak 37 kasus. Sebaran kasus kematian bayi di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam gambar berikut :

Peta Sebaran Kasus Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



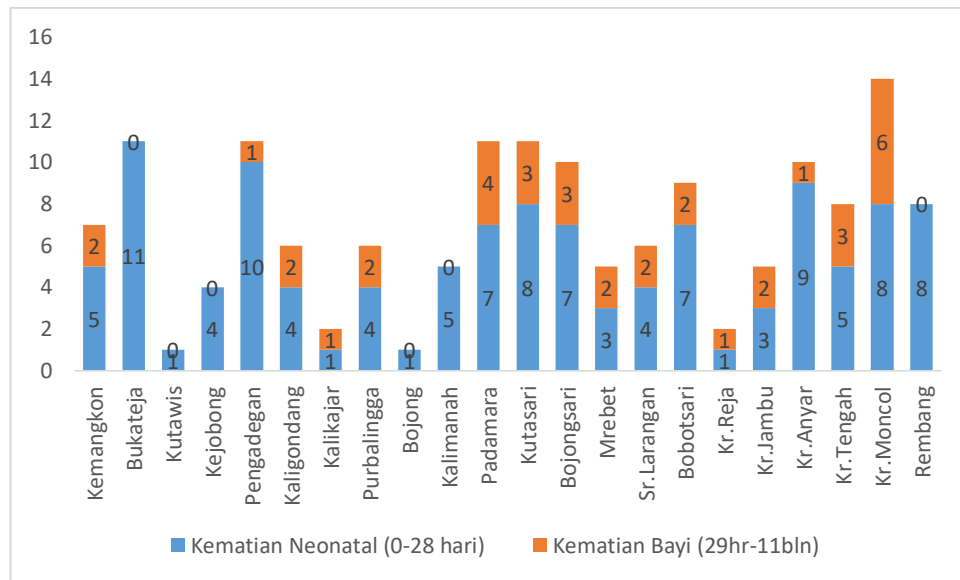
Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan. Kecamatan Karangmoncol merupakan kecamatan dengan penyumbang kasus kematian bayi tertinggi yaitu sebanyak 14 kasus. Dari 22 Puskesmas yang ada di Kabupaten Purbalingga jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Puskesmas Karangmoncol dengan jumlah 14 kasus dan Kematian bayi terendah terdapat di Puskesmas Bojong dan Puskesmas Kutawis dengan jumlah 1 kasus kematian bayi.

Berikut ini jumlah kematian bayi per wilayah Puskesmas di Kabupaten Purbalingga tahun 2024:

Total Kematian Bayi Berdasarkan Puskesmas
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Puskesmas	Total Kematian Bayi		
		Kematian Neonatal (0-28hr)	Kematian Bayi (29hr – 11 bln)	Total
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Kemangkon	5	2	7
2	Puskesmas Bukateja	11	0	11
3	Puskesmas Kutawis	1	0	1
4	Puskesmas Kejobong	4	0	4
5	Puskesmas Pengadegan	10	1	11
6	Puskesmas Kaligondang	4	2	6
7	Puskesmas Kalikajar	1	1	2
8	Puskesmas Purbalingga	4	2	6
9	Puskesmas Bojong	1	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	5	0	5
11	Puskesmas Padamara	7	4	11
12	Puskesmas Kutasari	8	3	11
13	Puskesmas Bojongsari	7	3	10
14	Puskesmas Mrebet	3	2	5
15	Puskesmas Serayu Larangan	4	2	6
16	Puskesmas Bobotsari	7	2	9
17	Puskesmas Karangreja	1	1	2
18	Puskesmas Karangjambu	3	2	5
19	Puskesmas Karanganyar	9	1	10
20	Puskesmas Karangtengah	5	3	8
21	Puskesmas Karangmoncol	8	6	14
22	Puskesmas Rembang	8	0	8
Jumlah		116	37	153

Total Kematian Bayi Berdasarkan Puskesmas Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Beberapa penyebab kematian yang terjadi pada usia 0-28 hari di antaranya BBLR sebanyak 46 kasus, asfiksia sebanyak 12 kasus, kelainan kongenital sebanyak 24 kasus, kelainan jantung sebanyak 11 kasus dan penyebab lainnya seperti RDS, Gerd, tumor paru, kelainan usus, gagal nafas. Kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan disebabkan karena pneumonia sebanyak 5 kasus, kelainan jantung sebanyak 7 kasus, kelainan kongenital sebanyak 2 kasus, diare sebanyak 2 kasus, meningitis sebanyak 2 kasus, dan penyebab lainnya seperti leukemia, thypoid, kejang demam, TB organ lain, sepsis.

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan upaya penurunan Angka Kematian Bayi antara lain:

- 1) Masih ditemukan 8,2% bayi dengan BBLR
- 2) KEK pada ibu hamil sebesar 16,49% yang berisiko melahirkan bayi prematur / BBLR
- 3) Tatalaksana MTBM pada bayi muda belum optimal dilakukan pada kunjungan neonatus
- 4) Belum semua Rumah sakit melakukan AMP pada kasus kematian bayi
- 5) Kurangnya peran lintas sektor pada upaya penurunan AKB

Solusi penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Deteksi dini dan monitoring tindak lanjut pada ibu hamil dengan risiko IUGR
- 2) Pemberian dan pemantauan asupan nutrisi yang adekuat bagi ibu hamil
- 3) Peningkatan kapasitas bidan desa dalam tata laksana MTBM saat kunjungan neonatus
- 4) Melakukan refreshing AMPSR pada FKTL
- 5) Perlu adanya penguatan komitmen peran dan tanggung jawab setiap anggota Tim Pokja Penurunan AKI AKB

Strategi dalam upaya penurunan AKB merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan AKI yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Program yang dilaksanakan dalam upaya penurunan AKB yaitu Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut melalui kegiatan-kegiatan Fasilitasi Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi dan Peningkatan Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut.

c. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita (AKBA) merupakan jumlah kematian balita 0-15 tahun di satu wilayah per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Kematian balita di dalamnya mencakup jumlah kematian bayi umur 0-11 bulan. Angka Kematian Balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

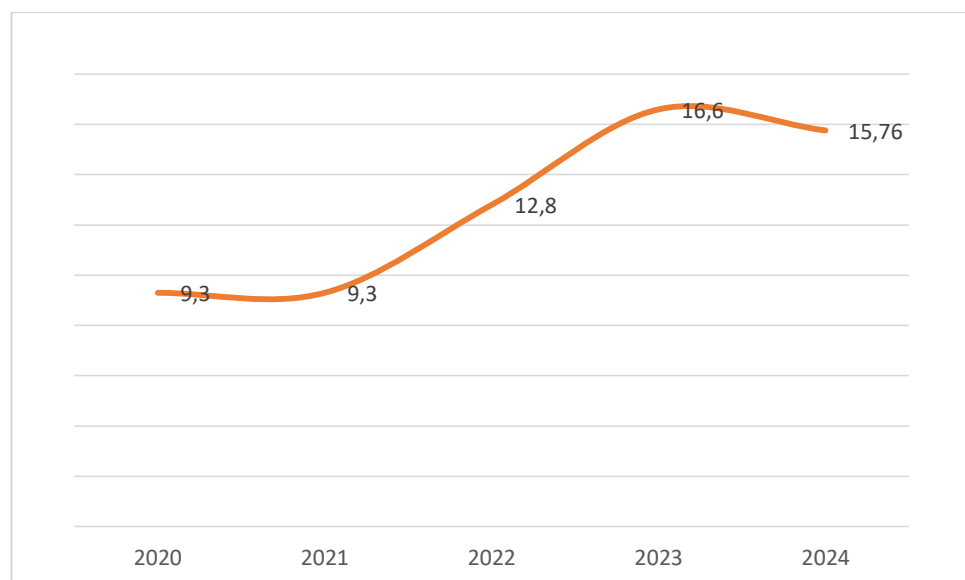
Angka Kematian Balita di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 15,76 per 1.000 kelahiran hidup dengan 182 kasus kematian. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 9,05 per 1.000 kelahiran hidup maka capaian Angka Kematian Balita mencapai 54,71% dan termasuk dalam kategori **Sedang**. Namun capaian ini lebih tinggi dari tahun lalu dengan Angka Kematian Balita tahun 2023 sebesar 16,6 per 1.000 kelahiran hidup dengan 211 kasus kematian.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami tren yang fluktuatif, dimana AKB mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2023, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024. Capaian kinerja

jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 56,60% dengan target masa akhir Renstra adalah 8,92 per 1.000 kelahiran hidup. Diketahui AKBA tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan ekstrim terjadi pada tahun 2023, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain adanya perubahan metode pelaporan yaitu menggunakan sistem Maternal Perinatal Death (MPDN) yaitu sistem berbasis fasilitas Pelayanan kesehatan sehingga seluruh kematian bayi di fasyankes manapun akan ternotifikasi dan tercatat dalam sistem apabila orang tua memiliki KTP Kabupaten Purbalingga walaupun kematian terjadi di Kabupaten lain. Perbaikan pelaporan ini menyediakan data yang lebih akurat dan menyeluruh sehingga menyebabkan catatan kasus kematian balita menjadi naik. Namun dari grafik tren lima tahun terakhir terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu Angka Kematian Balita menjadi 15,76 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah 182 kasus.

Tren capaian AKBA di Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Tren Angka Kematian Balita
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Kasus kematian balita (AKBA) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebanyak 182 kasus dengan jumlah kasus kematian balita usia 12-59 bulan sebanyak 29 kasus. Dari 22 Puskesmas di Kabupaten Purbalingga jumlah kematian balita keseluruhan yang tertinggi terdapat di Puskesmas Padamara dengan jumlah 16 kasus dan kematian balita terendah terdapat di Puskesmas Bojong dengan jumlah 1 kasus kematian.

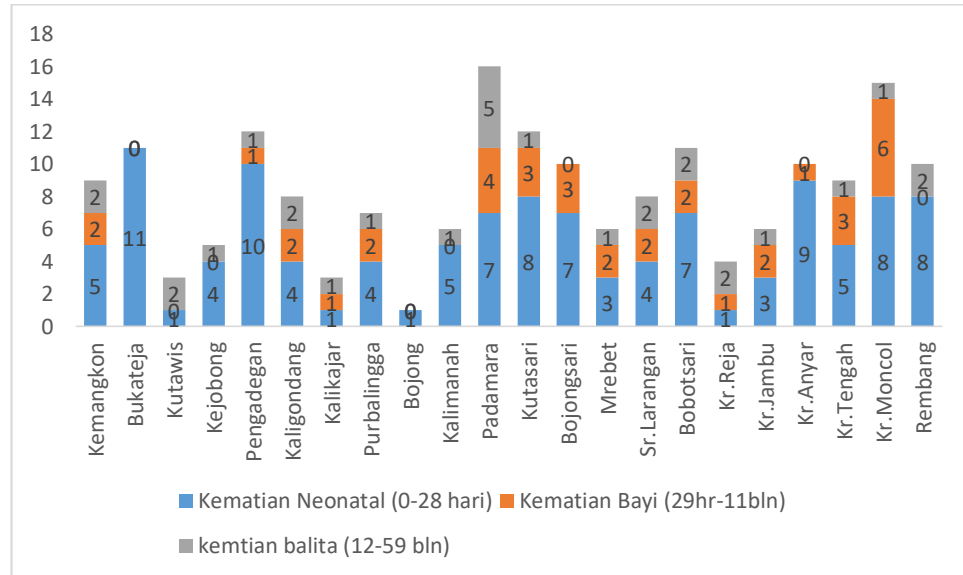
Berikut ini jumlah kematian balita per wilayah Puskesmas di Kabupaten Purbalingga tahun 2024:

**Total Kematian Balita Berdasarkan Puskesmas
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**

No	Puskesmas	Total Kematian Balita			
		Kematian Neonatal (0-28hr)	Kematian Bayi (29hr – 11 bln)	Kematian Balita (12-59 bln)	Total
1	2	3	4	5	6
1	Puskesmas Kemangkon	5	2	2	9
2	Puskesmas Bukateja	11	0	0	11
3	Puskesmas Kutawis	1	0	2	3
4	Puskesmas Kejobong	4	0	1	5
5	Puskesmas Pengadegan	10	1	1	12
6	Puskesmas Kaligondang	4	2	2	8
7	Puskesmas Kalikajar	1	1	1	3
8	Puskesmas Purbalingga	4	2	1	7
9	Puskesmas Bojong	1	0	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	5	0	1	6
11	Puskesmas Padamara	7	4	5	16
12	Puskesmas Kutasari	8	3	1	12
13	Puskesmas Bojongsari	7	3	0	10
14	Puskesmas Mrebet	3	2	1	6
15	Puskesmas Serayu Larangan	4	2	2	8
16	Puskesmas Bobotsari	7	2	2	11
17	Puskesmas Karangreja	1	1	2	4
18	Puskesmas Karangjambu	3	2	1	6
19	Puskesmas Karanganyar	9	1	0	10
20	Puskesmas Karangtengah	5	3	1	9
21	Puskesmas Karangmoncol	8	6	1	15
22	Puskesmas Rembang	8	0	2	10

Jumlah	116	37	29	182
---------------	------------	-----------	-----------	------------

**Total Kematian Balita Berdasarkan Puskesmas
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**



Beberapa penyebab kematian yang terjadi pada usia 12-59 bulan yaitu disebabkan oleh pneumonia sebanyak 3 kasus, diare sebanyak 1 kasus, DBD sebanyak 2 kasus, kelainan kongenital jantung sebanyak 6 kasus, kelainan kongenital lainnya sebanyak 1 kasus, 16 kematian lainnya disebabkan oleh benjolan kepala, leukimia, kejang, ISPA, febris, meningitis, suspek ICH, syok hipovolemik, gagal nafas.

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan upaya penurunan Angka Kematian Balita antara lain:

- 1) Penangan MTBS yang dilakukan di Puskesmas belum optimal, penanganan balita sakit belum semua dilaksanakan sesuai tata laksana
- 2) 8 Puskesmas belum melaksanakan kalakarya MTBS
- 3) Masih ditemukan 12 kasus penyakit menular yang berpengaruh terhadap kematian balita
- 4) Pelaksanaan SDIDTK belum optimal, belum semua balita terpantau tumbuh kembangnya dengan baik karena fasilitas SDIDTK kurang memadai

- 5) Belum semua nakes memahami dan menggunakan buku KIA dengan benar, karena setiap 2 tahun terdapat revisi buku KIA
- 6) Peran lintas sektor dalam upaya penurunan AKB masih kurang optimal
- 7) Kurang pengawasan, pemantauan dan Analisis masalah di Puskesmas
- 8) Kurang komitmen Bersama Rumah Sakit dan jejaring sistem rujukan
- 9) Persamaan persepsi antara dokter dalam penanganan kegawatdaruratan

Solusi penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Supervisi pelaksanaan MTBS di Puskesmas
- 2) Melaksanakan kalakarya MTBS pada 8 Puskesmas
- 3) Meningkatkan peran bidan desa dan kader dalam monitoring tindak lanjut tata laksana pada balita dengan penyakit menular dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama yang sangat rentan terhadap usia balita
- 4) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan SDIDTK dengan peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan SDIDTK dan pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan SDIDTK secara bertahap
- 5) Optimalisasi peran lintas sektor dalam upaya penurunan AKBA
- 6) Koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam analisis pencegahan kematian balita

d. Indeks Keluarga Sehat

Pengukuran Indeks Kesehatan Keluarga atau Indeks Keluarga Sehat (IKS) dilakukan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Pengukuran dilakukan melalui 12 indikator yaitu: Kepesertaan KB, Persalinan Faskes, Status Imunisasi, ASI Eksklusif, Pemantauan Pertumbuhan Balita, TB, Hipertensi, ODGJ, Anggota Keluarga yang Merokok, Kepesertaan JKN, serta Akses terhadap Air Bersih dan Jamban Keluarga.

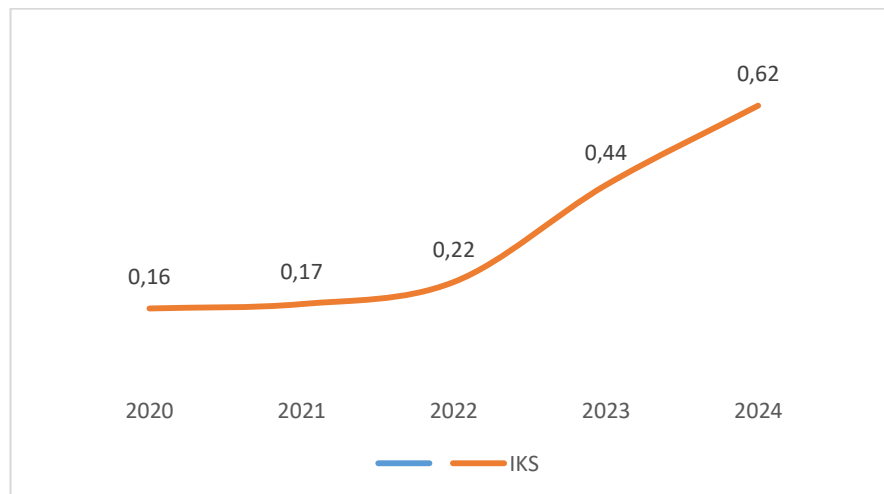
capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mencapai angka 0,62. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 0,50 maka IKS Kabupaten Purbalingga sudah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 124% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan angka IKS tahun 2023 yaitu 0,44 maka terdapat kenaikan

angka IKS sebanyak 0,18. Dengan capaian rata IKS yaitu 0,62 maka Kabupaten Purbalingga mencapai status pra sehat.

Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten dari Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan dimulai pada Tahun 2023, jika sebelumnya kenaikan hanya sebesar 0,01 per tahun, pada Tahun 2023 ada lonjakan kenaikan IKS sebesar 0,22, dari Capaian IKS 0,22 pada Tahun 2022 menjadi 0,44 pada Tahun 2023, sedangkan kenaikan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 sebesar 0,18 dari IKS 0,44 di Tahun 2023 menjadi 0,62 Tahun 2024. Capaian kinerja jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 295,2% dengan target masa akhir Renstra adalah 0,21.

Tren capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

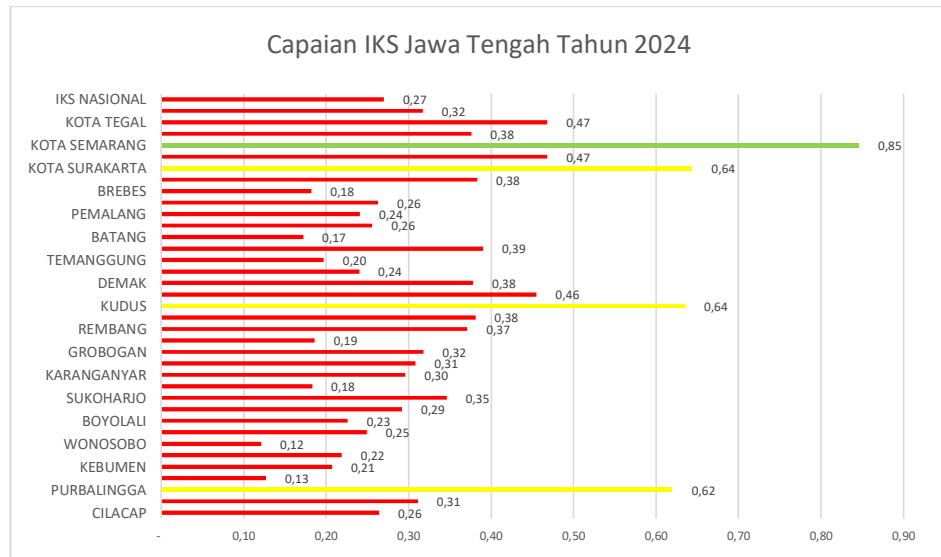
Tren Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Capaian kinerja program PIS-PK Kabupaten Purbalingga jika dibandingkan dengan capaian IKS rata-rata Provinsi Jawa tengah sudah di atas rata-rata capaian di Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 0,32. Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat ke 4 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian IKS Nasional, capaian IKS kabupaten Purbalingga sudah pada angka yang lebih tinggi, dimana IKS Nasional baru mencapai angka 0,27.

Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

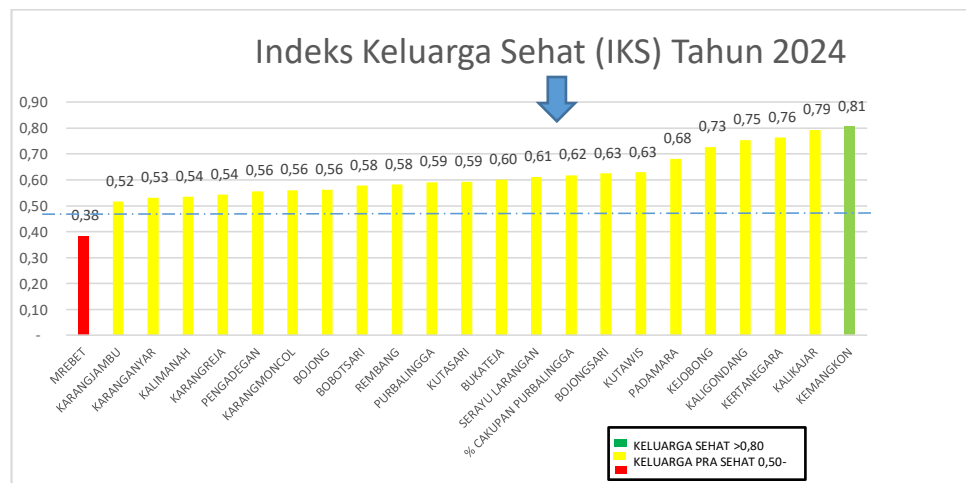


Capaian Indeks Keluarga Sehat Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Puskesmas	Nilai IKS
1	2	3
1	Puskesmas Mrebet	0,38
2	Puskesmas Karangjambu	0,52
3	Puskesmas Karanganyar	0,53
4	Puskesmas Kalimanah	0,54
5	Puskesmas Karangreja	0,54
6	Puskesmas Pengadegan	0,56
7	Puskesmas Karangmoncol	0,56
8	Puskesmas Bojong	0,56
9	Puskesmas Bobotsari	0,58
10	Puskesmas Rembang	0,58
11	Puskesmas Purbalingga	0,59
12	Puskesmas Kutasari	0,59

13	Puskesmas Bukateja	0,60
14	Puskesmas Serayu Larangan	0,61
15	Puskesmas Bojongsari	0,63
16	Puskesmas Kutawis	0,63
17	Puskesmas Padamara	0,68
18	Puskesmas Kejobong	0,73
19	Puskesmas Kaligondang	0,75
20	Puskesmas Karangtengah	0,76
21	Puskesmas Kalikajar	0,79
22	Puskesmas Kemangkon	0,81
	Cakupan Kabupaten	0,62

Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Berdasarkan grafik diatas, capaian IKS tertinggi pada Puskesmas Kemangkon dengan IKS 0,81 dan terendah di Puskesmas Mrebet dengan IKS 0,38. Dilihat dari rata-rata kabupaten, sebagian Puskesmas masih berada dibawah nilai rata-rata Kabupaten.

Untuk intervensi IKS rata-rata Puskesmas di Kabupaten Purbalingga yaitu sebanyak 20 Puskesmas masuk dalam kategori Keluarga Pra Sehat dengan capaian IKS 0,62. 1 Puskesmas dalam Kategori IKS Sehat dengan IKS 0,81 yaitu Puskesmas Kemangkon; dan 1 Puskesmas dalam Kategori Tidak Sehat dengan IKS 0,38 yaitu Puskesmas Mrebet.

Faktor keberhasilan capaian indeks keluarga sehat melebihi target yang ditetapkan adalah petugas Puskesmas yang rajin melakukan kunjungan keluarga dan langsung di input di aplikasi PIS-PK.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja indeks keluarga sehat diantaranya:

- 1) Pelaporan belum terintegrasi dengan kunjungan / kegiatan yang dilakukan oleh program
- 2) Belum melakukan intervensi secara berkelanjutan

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan intervensi bersama sama dengan program
- 2) Percepatan update data

Kegiatan pendukung PIS-PK berupa Pertemuan Koordinasi Terintegrasi Lintas Program di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Lintas Sektor terkait 12 Indikator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta Pertemuan Teknis Terintegrasi Lintas Program dan Puskesmas dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan *best practice* dari Puskesmas dengan Capaian IKS tertinggi serta Kegiatan Pembinaan / Monev PIS-PK yang dilaksanakan terintegrasi dengan Kegiatan Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB).

3. Sasaran II: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2024, indikator kinerja menurunnya angka morbiditas dan mortalitas yaitu : Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk, Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk.

a. Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terhadap Jumlah Penduduk

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Cakupan rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk diperoleh realisasi sebesar 1,64 per 5.000 penduduk. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebesar 1,50 per 5.000 penduduk sehingga capaian kinerja sebesar 109,33% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian rasio FKTP terhadap jumlah penduduk tahun 2023 mengalami kenaikan dari capaian tahun lalu yaitu 1,63 per 5.000 penduduk.

Berdasarkan KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/2194/2023 tentang Rasio Dokter dan Dokter Gigi terhadap kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, rasio dokter terhadap kepersertaan JKN adalah 1:5000. Satu Dokter praktek mandiri melayani 5.000 penduduk, satu klinik melayani 10.000 penduduk, satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Didapatkan poin nilai Puskemas adalah 6, klinik adalah 2, Dokter praktek Mandiri adalah 1.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 terdiri dari 22 Puskesmas, 24 klinik, 161 Dokter Praktik Mandiri (DPM). Rasio FKTP terhadap jumlah penduduk didapatkan dari Jumlah FKTP 312 (Jumlah Puskesmas kali 6, Jumlah klinik kali 2, jumlah DPM kali 1) per jumlah penduduk dikali 5.000 penduduk. Didapatkan hasil 1,64 per 5.000 penduduk. Berikut ini persebaran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan Kecamatan:

Persebaran jumlah FKTP Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
		Puskesmas	Klinik	TPMD
1	2	3	4	5
1	Kemangkon	1	1	3
2	Bukateja	2	3	10

3	Kejobong	1	0	5
4	Pengadegan	1	0	4
5	Padamara	1	2	9
6	Kaligondang	2	1	4
7	Purbalingga	2	7	48
8	Kalimanah	1	3	20
9	Karangjambu	1	0	1
10	Kutasari	1	1	4
11	Bojongsari	1	0	7
12	Bobotsari	1	1	7
13	Karanganyar	1	1	4
14	Kertanegara	1	1	1
15	Mrebet	2	0	9
16	Karangreja	1	0	11
17	Karangmoncol	1	2	5
18	Rembang	1	1	9
Jumlah		22	24	161

Salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan, hal ini dapat diketahui melalui perbandingan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk. Dengan terpenuhinya FKTP maka akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya rasio FKTP terhadap jumlah penduduk melebihi target yang ditetapkan adalah:

1) Adanya penambahan Dokter Praktek Mandiri (DPM) di tahun 2024
Hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- 1) Masih ada Dokter Praktek Mandiri (DPM yang tidak mengurus surat ijin praktik
- 2) Ada klinik yang belum terakreditasi, dikarenakan baru dibuka tahun ini. Berkaitan dengan hal tersebut strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dalam menindaklanjuti hambatan atau kendala dalam pencapaian target diantaranya sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan pendampingan pembuatan rekomendasi surat ijin praktek pada Dokter Praktek Mandiri (DPM)

Program penunjang tercapainya indikator kinerja Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap jumlah penduduk adalah Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

b. Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Cakupan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk diperoleh realisasi sebesar 350,51 per 100.000 penduduk. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 327,45 per 100.000 penduduk sehingga capaian kinerja sebesar 103,73% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk tahun 2023 mengalami kenaikan dari capaian tahun lalu yaitu 327,45 per 100.000 penduduk.

Seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Purbalingga sudah memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar. Dilakukan bimbingan teknis penyajian informasi data SDM Kesehatan dan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan untuk menghitung kebutuhan tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dilakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan melalui bimbingan teknis sesuai dengan bidang kesehatan.

Tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga per Desember Tahun 2024 sejumlah 3.637 tenaga kesehatan. Yang terdiri dari Medis sebanyak 432 orang, Psikologi klinis sebanyak 3 orang, Perawat sebanyak 1.469 orang, Bidan sebanyak 764 orang, Kefarmasian sebanyak 372 orang,

Kesehatan Masyarakat sebanyak 90 orang, Kesehatan lingkungan sebanyak 57 orang, gizi sebanyak 60 orang, keterampilan fisik sebanyak 23 orang, keteknisian medis sebanyak 170, teknik biomedika sebanyak 191 orang, nakes lainnya sebanyak 6 orang. Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan melebihi target yang ditetapkan adalah:

- 1) Adanya penambahan tenaga kesehatan melalui recruitment ASN
- 2) Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Purbalingga sudah memiliki sumber daya manusia kesehatan sesuai standar

Beberapa faktor hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- 1) Masih ada beberapa tenaga kesehatan yang belum mengurus surat ijin nakes.
- 2) Belum semua tenaga kesehatan mendapatkan bimtek sesuai dengan tugasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dalam menindaklanjuti hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan pendampingan pembuatan rekomendasi surat ijin tenaga kesehatan
- 2) Bimtek terhadap tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.
- 3) Peningkatan kerjasama dalam pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan lintas program di internal Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Organisasi Profesi.

4. Tujuan II: Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinkes

Kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga merupakan tingkat efektivitas dan efisiensi dari perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya. Kualitas kelembagaan perangkat daerah dapat dievaluasi untuk memastikan bahwa perangkat daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Meningkatnya

kualitas kelembagaan perangkat daerah dapat dilakukan dengan melakukan penataan kelembagaan, evaluasi, dan pembinaan.

Dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga tahun 2024 indikator kinerja meningkatnya kualitas kelembagaan daerah adalah Nilai kematangan perangkat daerah. Nilai Kematangan Perangkat Daerah merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah. Nilai ini didapatkan dari hasil penilaian kematangan organisasi (KOD) yang dilakukan secara tahunan.

Dari hasil penilaian kematangan organisasi (KOD) yang dilakukan pada tahun 2024 diperoleh nilai kematangan perangkat daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga sebesar 40. Target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 39 sehingga capaian kinerja sebesar 102,56% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian nilai kematangan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1 angka yaitu dari nilai 39.

Capaian nilai kematangan perangkat daerah dari tahun ke tahun terus meningkat. Diharapkan untuk tahun kedepannya dapat meningkatkan lagi nilai kematangan perangkat daerah.

Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan, diantaranya:

- a. Terpenuhinya bukti dukung kelengkapan indikator penilaian kematangan organisasi (KOD)
 - b. Adanya komitmen pimpinan terkait tercapainya nilai kematangan organisasi.
- Hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

- a. Belum terbentuknya tim penilaian kematangan organisasi (KOD) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga
- b. Beberapa nilai indikator kematangan organisasi masih belum optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut diantaranya:

- a. Menyusun surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga tentang tim penilaian kematangan organisasi (KOD)
- b. Meningkatkan nilai indikator kematangan organisasi yang masih belum optimal dengan memperbaiki dokumen-dokumen kelengkapan indikator.

5. Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana: Total Fertility Rate

TFR adalah singkatan dari Total Fertility Rate atau Angka Kelahiran Total yang mengindikasikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun) di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu. Upaya menggerakkan program KKBPK diawali dengan menurunkan angka TFR, dan sebagai upayanya yaitu melalui pengendalian angka kelahiran dengan penggunaan alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur. Sebagai penyumbang dalam kenaikan TFR yaitu angka kelahiran pada usia remaja. Oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang difokuskan dalam rangka penurunan kelahiran di usia remaja 15 – 19 tahun yaitu pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa berbasis sekolah, kampus maupun wilayah desa dan kecamatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sehingga terjadi peningkatan usia kawin pertama yang diikuti dengan persalinan di atas usia 20 tahun.

Dilihat dari sisi kesehatan reproduksi tidak lagi rentan terhadap risiko tinggi persalinan. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten purbalingga melalui urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Indikator Kinerja yaitu Rata –Rata Angka Kelahiran Total (TFR) sesuai dengan Misi ke 3 (tiga) Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah: Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak dan Misi ke 4 (empat) Kepala daerah dan wakil kepala daerah; Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan. Keterkaitan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Misi Bupati Purbalingga dan Wakil Bupati Purbalingga Periode 2021 - 2026 :

Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

1. Memfasilitasi pembangunan keluarga;
2. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten purbalingga terbagi menjadi tiga urusan yaitu urusan sosial dengan satu indikator kinerja, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan satu indikator kinerja, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dua indikator kinerja. Melalui urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan indikator kinerja yaitu Rata – Rata Angka Kelahiran Total (TFR) merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu Kabupaten dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana di kabupaten purbalingga. Pada tahun 2023 target Rata–Rata Angka Kelahiran Total (TFR) adalah 2.02 % realisasi sebanyak 2.02 %.

6. Sasaran III: Meningkatnya implementasi SAKIP Dinkes

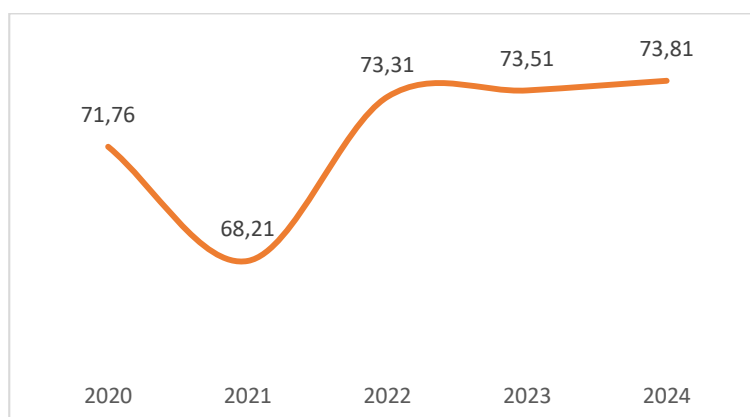
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah system manajemen kinerja yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Tujuan evaluasi adalah bentuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggung jawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai SAKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga sebesar 73,81. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga tahun

2024 sebesar 73,6 sehingga capaian kinerja sebesar 100,29% dan termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,30 dari 73,51.

Dalam lima tahun terakhir nilai SAKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga mengalami tren yang fluktuatif. Dimana terjadi penurunan realisasi di tahun 2021, namun dari tahun 2022 hingga tahun 2024 nilai SAKIP selalu mengalami peningkatan. Capaian Kinerja jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 99,07% dengan target masa akhir Renstra adalah 74,5.

Tren Nilai SAKIP
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Purbalingga Tahun 2020-2024



Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya nilai SAKIP Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga melebihi target yang ditetapkan adalah:

- a. Terintegrasinya sistem perencanaan, keuangan, monitoring evaluasi, dan kinerja
 - b. Adanya komitmen pimpinan terkait penerapan budaya kinerja
 - c. Adanya kepatuhan pegawai dalam pelaporan capaian kinerja
- Hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:
- a. Rapat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja telah dilaksanakan

namun belum dilaksanakan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja.

- b. Masih perlu meningkatkan pendalaman evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan serta pencapaian target kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut strategi yang dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dalam menindaklanjuti hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target-target kinerja secara berkala, serta mendokumentasikan secara memadai upaya dalam mencapai target-target kinerja organisasi
- b. Melaksanakan seluruh rekomendasi tim evaluator SAKIP.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten.

Isu-Isu Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan. Isu-isu tersebut muncul sebagai hasil evaluasi capaian kinerja, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Masih adanya kasus kematian ibu dan balita
2. Masih ditemukannya balita stunting maupun wasting, serta anemia pada remaja putri dan ibu hamil
3. Semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular
4. Surveilans dan penemuan kasus aktif penyakit menular belum optimal
5. Kurangnya jumlah puskesmas terhadap rasio jumlah penduduk dan akses rumah sakit yang terpusat di wilayah perkotaan
6. Belum Optimalnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Kualitas pembangunan keluarga belum optimal
8. Kesertaan KB dan penggunaan MKJP belum optimal

Dari permasalahan-permasalahan diatas apabila jika tidak ditangani akan menimbulkan beberapa dampak diantaranya: tidak tercapainya visi dan misi Kepala

Daerah, tidak tercapainya target indikator RPJMD, Renstra, dan SPM bidang kesehatan., peningkatan angka kesakitan, meningkatnya beban pembiayaan kesehatan, laju pertumbuhan penduduk meningkat.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dimas yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Masih tingginya kasus penyakit menular dan meningkatnya penyakit Tidak Menular, serta permasalahan gizi (stunting, anemia) yang memerlukan intervensi komprehensif.
2. Akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama di wilayah tertentu, belum sepenuhnya optimal baik dari sisi kapasitas tenaga kesehatan, sarana prasarana, maupun mutu layanan.
3. Perubahan gaya hidup masyarakat
4. Sistem Informasi Kesehatan belum sepenuhnya terintegrasi
5. Unmet need dan rendahnya penggunaan MKJP

Sedangkan peluang bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan pelayanan diantaranya adalah:

1. Dukungan kebijakan nasional dan daerah
2. Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan
3. Penguatan kolaborasi lintas sektor
4. Peningkatan peran serta masyarakat dan kader

2.3 Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purbalingga maka ditetapkan Isu Strategis Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Masih adanya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
- 2) Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
- 3) Prevalensi Stunting yang masih tinggi

- 4) Kurangnya jumlah puskesmas terhadap rasio jumlah penduduk dan akses rumah sakit yang terpusat di wilayah perkotaan
- 5) Masih rendahnya indeks keluarga sehat

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan di Purbalingga, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai *leading sector* merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi dalam 5 program yaitu:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dari perencanaan awal untuk dapat melaksanakan program/kegiatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran Rp. 172.272.378.000/tahun. Karena keterbatasan dana, untuk mengatasi hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disusun dengan prinsip skala prioritas, pemanfaatan dana yang efisien, dan kegiatan yang efektif yang mempunyai daya unkit guna mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan Purbalingga

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan				
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	A. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	121.333.052.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	121.333.052.000	
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti		100 persen		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti		100 persen		
		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 persen		Persentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 persen		
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		100 persen		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		100 persen		
		Persentase pengadaan barang milik daerah		100 persen		Persentase pengadaan barang milik daerah		100 persen		
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 persen		Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 persen		
		Persentase ketersediaan layanan BLUD		100 persen		Persentase ketersediaan layanan BLUD		100 persen		
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun		100 persen	13.000.000	Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun		100 persen	13.000.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	10.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Perangkat Daerah								
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	5 dokumen	3.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	5 dokumen	3.000.000
			2. Administrasi Keuangan	Persentase ASN yang menerima gaji tepat waktu		100 Persen	120.219.152.000	Persentase ASN yang menerima gaji tepat waktu		100 Persen	120.219.152.000
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	1.640 orang	120.029.252.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	1.640 orang	120.029.252.000
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga	54 Dokumen	90.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga	54 Dokumen	90.000.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purbalingga	5 dokumen	99.900.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purbalingga	5 dokumen	99.900.000
			3. Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi umum dinas yang yang difasilitasi		100 persen	4.800.000	Persentase Administrasi umum dinas yang yang difasilitasi		100 persen	4.800.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	1 Laporan	4.800.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	1 Laporan	4.800.000
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang terselesaikan yang tersosialisasikan		100 Persen	8.000.000	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang terselesaikan yang tersosialisasikan		100 persen	8.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti	Kab. Purbalingga	36 orang	5.000.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	36 Orang	5.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan							
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bintek perundang-undangan	Kab. Purbalingga	30 orang	3.000.000	Jumlah orang yang mengikuti bintek perundang-undangan	Kab. Purbalingga	30 orang	3.000.000
			5. Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum dinas yang yang difasilitasi		100 Persen	85.000.000	Persentase Administrasi umum dinas yang yang difasilitasi		100 persen	85.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	4.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	4.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	51.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	51.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Purbalingga	24 Dokumen	3.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Purbalingga	24 Dokumen	3.000.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	15 Laporan	8.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	15 Dokumen	12.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purbalingga	50 Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purbalingga	50 Laporan	11.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purbalingga	9 dokumen	7.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purbalingga	9 dokumen	8.800.000
			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD yang harus disediakan		100 Persen	50.000.000			100 persen	50.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Purbalingga	4 Unit	50.000.000	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Purbalingga	4 Unit	50.000.000
			7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen yang harus dikirim		100%	763.000.000	Persentase dokumen yang harus dikirim		100 persen	763.000.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	20 Laporan	1.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	20 Laporan	1.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purbalingga	60 Laporan	300.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purbalingga	60 Laporan	300.000.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	12.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	12.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	450.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	450.000.000
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara		100%	380.000.000	Persentase BMD yang terpelihara		100 persen	380.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Purbalingga	39 unit	325.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Purbalingga	39 unit	325.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purbalingga	40 unit	30.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purbalingga	40 unit	30.000.000
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purbalingga	2 unit	25.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purbalingga	2 unit	25.000.000
	B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya		100 Persen	48.670.467.000	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya		100 Persen	48.670.467.000
				Rasio Puskesmas thd jumlah penduduk		2,25 sd 2,30 per 100.000		Rasio Puskesmas thd jumlah penduduk		2,25 sd 2,30 per 100.000	
				Prevalensi Stunting		11 Persen		Prevalensi Stunting		11 Persen	
				Angka Morbiditas		17,6 Persen		Angka Morbiditas		17,6 Persen	
	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			Cakupan fasilitasi pelayanan primer		100 Persen	17.270.000.000	Cakupan fasilitasi pelayanan primer		100 persen	17.270.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
				Persentase Puskesmas dan RS dengan ketersediaan sapras, alkes sesuai standar		100 Persen		Persentase Puskesmas dan RS dengan ketersediaan sapras, alkes sesuai standar		100 Persen	
				Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk		3,3 per 100.000		Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk		3,3 per 100.000	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Purbalingga	3 Unit	3.000.000.000	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Purbalingga	3 unit	3.000.000.000
			Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	Kab. Purbalingga	3 unit	3.000.000.000	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	Kab. Purbalingga	3 Unit	3.000.000.000
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Gambarsari, Purbalingga	191 unit	1.000.000.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	191 unit	1.000.000.000
			Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Kab. Purbalingga	2 unit	150.000.000	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Kab. Purbalingga	10 unit	150.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Purbalingga	2 paket	10.100.000.000	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Purbalingga	2 Paket	.10.100.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Purbalingga	250.000 keluarga	10.000.000	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Purbalingga	250.000 Keluarga	10.000.000
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	22 Paket	10.000.000	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	23 Paket	10.000.000
			2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen	31.325.367.000	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 persen	31.325.367.000
				Cakupan pelayanan ibu hamil		100 Persen		Cakupan pelayanan ibu hamil		100 Persen	
				Cakupan pelayanan Ibu bersalin		100 Persen		Cakupan pelayanan Ibu bersalin		100 Persen	
				Cakupan pelayanan Bayi Baru Lahir		100 Persen		Cakupan pelayanan Bayi Baru Lahir		100 Persen	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
				Cakupan pelayanan Balita		100 Persen		Cakupan pelayanan Balita		100 Persen	
				Cakupan pelayanan balita gizi buruk		100 Persen		Cakupan pelayanan balita gizi buruk		100 Persen	
				Cakupan usia lanjut yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen		Cakupan usia lanjut yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen	
				Cakupan puskesmas yang telah menerapkan K3 internal Puskesmas		100 Persen		Cakupan puskesmas yang telah menerapkan K3 internal Puskesmas		100 Persen	
				Cakupan Desa ODF		100 Persen		Cakupan Desa ODF		100 Persen	
				Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam		100 Persen		Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam		100 Persen	
				Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara		100 Persen		Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara		100 Persen	
				Cakupan kasus KIP1 yang yang diinvestigasi		100 Persen		Cakupan kasus KIP1 yang yang diinvestigasi		100 Persen	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	12.144 orang	110.000.000	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	16.214 bumil	110.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11.781 orang	130.000.000	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	16.214 Bulin	130.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11.648 orang	150.000.000	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14.589 Bayi	150.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	52.578 orang	35.000.000	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	58.681 Balita	35.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	40.225 orang	80.000.000	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	141.976 Anak	80.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	669.907 orang	30.000.000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	604.136 orang	30.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	131.773 orang	12.000.000	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	114.718 Orang	12.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	236.224 orang	15.000.000	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	268.926 orang	15.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14.017 orang	15.000.000	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	268.926 orang	15.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	2.634 orang	10.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	2.471 Orang	10.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14.086 orang	100.000.000	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	7.675 Orang	100.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	15.076 orang	185.000.000	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	17.831 Orang	185.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	280.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	280.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	80.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	80.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Purbalingga	4 Dokumen	160.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Purbalingga	4 Dokumen	160.000.000
			Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Purbalingga	6 Dokumen	270.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Purbalingga	8 Dokumen	270.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	5.000.000
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	270.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	270.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	138 orang	12.500.000	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	138 orang	12.500.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	890 orang	10.000.000	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	890 orang	10.000.000
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Purbalingga	15 Dokumen	261.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Purbalingga	15 Dokumen	261.000.000
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Purbalingga	12 Dokumen	26.926.989.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Purbalingga	12 Dokumen	26.926.989.000
			Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusika	Kab. Purbalingga	560 Paket	424.763.000	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Purbalingga	560 Paket	424.763.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Laboratorium Rujukan/Nasional								
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Purbalingga	9 Dokumen	5.000.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Purbalingga	9 Dokumen	5.000.000
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	1.000.000.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	1.000.000.000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	26 Dokumen	51.485.000	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	26 Dokumen	51.485.000
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Purbalingga	15 Dokumen	10.000.000	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Purbalingga	15 Laporan	10.000.000
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Purbalingga	23 unit	290.000.000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Purbalingga	23 unit	290.000.000
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	396.630.000	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	135.740.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan					
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif		
			4. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sistem Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam SIK			100 Persen	60.100.000	Persentase sistem Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam SIK			100 persen	60.100.000
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Purbalingga	40 Dokumen	60.100.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Purbalingga	40 Dokumen	60.100.000		
			5. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Cakupan rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan			100 Persen	15.000.0000	Cakupan rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan			15.000.0000	15.000.0000
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Purbalingga	9 unit	5.000.000	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Purbalingga	9 unit	5.000.000		
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	54 unit	5.000.000	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	54 unit	5.000.000		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	54 unit	5.000.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	54 unit	5.000.000		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan				
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 persen	783.211.000	Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar		100 persen	783.211.000	
1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota		Cakupan Tenaga Kesehatan yang mendapatkan ijin praktek		93 persen	10.500.000	Cakupan Tenaga Kesehatan yang mendapatkan ijin praktek		93 persen	10.500.000	
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	7.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	7.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	3.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	3.500.000
2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Cakupan RSUD dan Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar (%)		100 persen	91.831.000	Cakupan RSUD dan Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar (%)		100 persen	91.831.000	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Purbalingga	50 orang	16.200.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Purbalingga	50 orang	16.200.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purbalingga	200 dokumen	75.631.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purbalingga	200 dokumen	75.631.000
			3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikasi tenaga kesehatan		93 Persen	680.880.000	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikasi tenaga kesehatan		100 persen	680.880.000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Purbalingga	189 orang	680.880.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Purbalingga	189 orang	680.880.000
			D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar		100 persen	206.326.000	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar		100 persen	206.326.000
				Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		100 persen		Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		100 persen	
			1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase rekomendasi pemberian ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 Persen	10.000.000	Persentase rekomendasi pemberian ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 persen	10.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Purbalingga	39 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Purbalingga	30 Dokumen	10.000.000
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-
			2. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		100 Persen	10.000.000	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		10.000.000	10.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Kab. Purbalingga	92 dokumen	10.000.000	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	92 dokumen	10.000.000
			3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi pemberian ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 Persen	10.000.000	Persentase rekomendasi pemberian ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		10.000.000	10.000.000
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	120 dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	92 Dokumen	10.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan				
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	
			Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
			3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil pemeriksaan post market yang ditindaklanjuti		100%	186.326.000	Persentase Hasil pemeriksaan post market yang ditindaklanjuti			186.326.000	186.326.000
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	154 unit	186.326.000	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	154 Unit	186.326.000	186.326.000
			E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/kelurahan Sehat mandiri		46,1 persen	1.279.322.000	Persentase Desa/kelurahan Sehat mandiri		36%	1.279.322.000	1.279.322.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
		1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi		100%	1.150.000.000	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi		100 persen	1.150.000.000
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purbalingga	13 Dokumen	1.150.000.000	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purbalingga	13 Dokumen	1.150.000.000
		2. Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan RT yang ber PHBS		100 persen	56.000.000	Cakupan RT yang ber PHBS		100 persen	56.000.000
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purbalingga	5 Dokumen	56.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purbalingga	5 Dokumen	56.000.000
		3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa sehat mandiri		46,1 persen	73.322.000	Cakupan desa sehat mandiri		46,1 persen	73.322.000
		Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	73.322.000	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	73.322.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Kawin Pertama (MKUP)	Kab. Purbalingga	21%	234.900.000	Median Usia Kawin Pertama (MKUP)	Kab. Purbalingga	21%	234.900.000
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase terpenuhinya Program Bangsa Kencana	Kab. Purbalingga	100%	9.920.000	Persentase terpenuhinya Program Bangsa Kencana	Kab. Purbalingga	100%	9.920.000
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	1 kegiatan	3.957.000	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	1 kegiatan	3.957.000
			Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	1 kegiatan	2.400.000	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	1 kegiatan	2.400.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	4 kegiatan	3.563.000	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	Kab. Purbalingga	4 kegiatan	3.563.000
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan wilayah yang melaksanakan pengolahan data dan pelaporan	Kab. Purbalingga	100%	224.980.000	Cakupan wilayah yang melaksanakan pengolahan data dan pelaporan	Kab. Purbalingga	100%	224.980.000
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	18 laporan	143.400.000	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	18 laporan	143.400.000
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	Kab. Purbalingga	12 dokumen	74.400.000	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	Kab. Purbalingga	12 dokumen	74.400.000
			Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	Kab. Purbalingga	2 dokumen	7.180.000	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan	Kab. Purbalingga	2 dokumen	7.180.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			an, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Keluarga (Dokumen)				Keluarga (Dokumen)			
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan	Kab. Purbalingga	1,40%	1.935.604.000	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan	Kab. Purbalingga	1,40%	1.935.604.000
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Kab. Purbalingga	19,20%	855.288.000	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Kab. Purbalingga	19,20%	855.288.000
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	Kab. Purbalingga	18 laporan	799.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	Kab. Purbalingga	18 laporan	799.200.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Purbalingga	3 dokumen	16.088.000	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	Kab. Purbalingga	3 dokumen	16.088.000
			Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	Kab. Purbalingga	1 organisasi	40.000.000	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	Kab. Purbalingga	1 organisasi	40.000.000
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase laporan kegiatan kader PKB/PLKB	Kab. Purbalingga	100%	179.250.000	Persentase laporan kegiatan kader PKB/PLKB	Kab. Purbalingga	100%	179.250.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Penggerak n Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Purbalingg a	1813 orang	179.250.000	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Purbalingg a	1813 orang	179.250.000
			Pengendali an dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaa n Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	Kab. Purbaling ga	90,20%	848.566.000	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	Kab. Purbaling ga	90,20%	848.566.000
			Pengendalia n Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya (Laporan)	Kab. Purbalingg a	12 laporan	86.400.000	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya (Laporan)	Kab. Purbalingg a	12 laporan	86.400.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Kab. Purbalingga	15000 orang	758.846.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Kab. Purbalingga	15000 orang	758.846.000
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	Kab. Purbalingga	3 laporan	3.320.000	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	Kab. Purbalingga	3 laporan	3.320.000
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Proporsi Kampung KB Mandiri	Kab. Purbalingga	0,84%	52.500.000	Proporsi Kampung KB Mandiri	Kab. Purbalingga	0,84%	52.500.000
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Purbalingga	7 unit	52.500.000	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Purbalingga	7 unit	52.500.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Kampung Keluarga Berkualitas								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif	Kab. Purbalingga	98%	5.109.743.000	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif	Kab. Purbalingga	98%	5.109.743.000
				Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan	Kab. Purbalingga	71%		Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan	Kab. Purbalingga	71%	-
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Kab. Purbalingga	83,82%	10.055.000	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Kab. Purbalingga	83,82%	10.055.000
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Kab. Purbalingga	1 laporan	4.760.000	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Kab. Purbalingga	1 laporan	4.760.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)				Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)			
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	5.295.000	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	5.295.000
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga	Kab. Purbalingga	100%	5.099.688.000	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga	Kab. Purbalingga	100%	5.099.688.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan			
				Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif
			Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	Kab. Purbalingga	769 laporan	5.075.400.000	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	Kab. Purbalingga	769 laporan	5.075.400.000
			Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	3 laporan	7.538.000	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	3 laporan	7.538.000
			Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	16.750.000	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	Kab. Purbalingga	1 laporan	16.750.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setiap usulan pembangunan yang masuk akan ditelaah kesesuaiannya dengan program prioritas pembangunan daerah. Usulan tersebut dapat berupa usulan yang ditujukan secara langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun desa.

Masukan dari legislatif melalui pokok-pokok pikiran anggota legislatif serta usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Purbalingga lainnya akan menjadi acuan dasar bagi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga untuk membuat usulan program/kegiatan. Usulan masuk yang sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah akan diprioritaskan untuk masuk dalam program/kegiatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga.

Untuk tahun 2025 ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diterima oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga seperti yang terlihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat (Hasil Musrenbang Kecamatan)

USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN
Jambanisasi / ODF	Masih ada beberapa kepala keluarga keluarga miskin yang belum mempunyai jamban dan membuang BAB di sungai	Desa Larangan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Larangan
Jambanisasi / ODF	Masih banyak KK yang belum memiliki Jamban	Kadus 1,2,3 dan 4., Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Rembang	Panusupan
Pembangunan PKD	Plafon sudah rusak berat dan pondasi sudah terkikis air sungai	RT 01 RW 01 KELURAHAN KEDUNGMEJAN GAN, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Purbalingga	Kedungmenjan gan
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Rehab Pustu Desa	Karangwringin RT 03 RW 02 Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Baleraksa

Jambanisasi / ODF	masih ada yang BAB sembarangan	Desa Tangkisan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Tangkisan
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	sudah ada pustu tapi rusak dan sudah tidak pernah terjamah	Desa Tangkisan RT 001 RW 05 Dusun III Katimaha, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Tangkisan
Jambanisasi / ODF	Penyelesaian BAB di sungai	Serayukaranganya r, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Serayu Karanganyar
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Puskesmas pembantu belum ada	Desa Bojong, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Mrebet	Bojong
Jambanisasi / ODF	Menunjang program ODF	Dusun 1,2,3,4 Desa Galuh, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bojongsari	Galuh
Pembangunan Puskesmas dan Gedung	Rusak	RT 007 RW 003 Jatisaba, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Purbalingga	Jatisaba

Puskesmas Pembantu					
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Tidak ada fasilitas pendukung(pagar keliling, tempat parkir, halaman masih tanah)	RT. 28 RW 13 Dusun Larangan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kejobong	Bandingan
Jambanisasi / ODF	Masih banyak warga masyarakat yang belum punya jamban dan spiteng	Desa Rajawana , Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Rajawana
Jambanisasi / ODF	Masih ada yang buang air besar (BABS) sembarangan	Desa Pengadegan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Pengadegan
Pengadaan alat kesehatan	Tidak memiliki alat transportasi kesehatan (Mobil Siaga)	Desa Tlahab Lor RT 001 RW 006, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangreja	Tlahab Lor
Pengadaan alat kesehatan	Desa tidak memiliki alat transportasi kesehatan berupa mobil	Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten	Kab. Purbalingga	Karangreja	Serang

		Purbalingga, Kab. Purbalingga			
Pengadaan alat kesehatan	Belum adanya transportasi kesehatan desa	Dusun I, II, dan III, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangreja	Karangreja
Pembangunan PKD	Kelurahan Purbalingga Lor belum mempunyai PKD yang representatif sebagai pengganti PKD yang dibongkar.	Jalan Jambukarang No. 03 kompleks Kantor Kelurahan Purbalingga Lor, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Purbalingga	Purbalingga Lor
Jambanisasi / ODF	Masih banyak warga Masyarakat yang belum memiliki Jamban	Desa Jinkang, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangjambu	Jinkang
Jambanisasi / ODF	Masih banyak yang sistem pembuangan jambannya ke sungai	Dusun I, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Karangduren
Pengadaan alat kesehatan	Pengadaan Ambulan Desa	Dusun II, Desa Bungkanel, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karanganyar	Bungkanel

Jambanisasi / ODF	masih banyak yg belum punya jamban	Limbangan Dusun I, II, III dan Dusun IV, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kutasari	Limbangan
Jambanisasi / ODF	Masih adanya keluarga yang BAB sembarangan	Desa Candiwulan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kutasari	Candiwulan
Jambanisasi / ODF	Desa Sirau Masih Ada Beberapa Masyarakat Belum Memiliki Jamban Sehat	Dusun 1 Paguyangan, Dusun 2 Bandingan, Dusun 3 Sirau, Dusun 4 Pengungsen, dan Dusun 5 Karanggintung, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Sirau
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Desa Sirau Belum Memiliki Layanan Kesehatan Yang Memadahi dan Jarak Tempuh Ke Layanan	Dusun 1 Paguyangan, Dusun 2 Bandingan, Dusun 3 Sirau, Dusun 4 Pengungsen, dan	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Sirau

	Kesehatan Kecamatan 30 KM	Dusun 5 Karanggintung, Kab. Purbalingga			
Jambanisasi / ODF	banyak rumah penduduk miskin yang belum memiliki jamban	desa tamansari, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Tamansari
Jambanisasi / ODF	Masih terdapat keluarga yang tidak memiliki fasilitas jamban yang memadai dan layak	Desa Gunungkarang, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Gunungkarang
Pembangunan PKD	PKD Kelurahan Sudah Rusak	Karangsantul RT 02 RW 01, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Padamara	Karangsantul
Pengadaan alat kesehatan	Belum adanya fasilitas mobil siaga untuk mobilitas pelayanan kesehatan di DEsa Pegandekan	Desa Pegandekan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Kemangkon	Pegandekan

Pengadaan alat kesehatan	Belum ada Mobil Siaga Kesehatan	Desa Panunggalan, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Pengadegan	Panunggalan
Jambanisasi / ODF	Kamar mandi/wc Umum Pelayanan di kecamatan Padamara rusak berat/ambles	Kantor Kecamatan Padamara, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Padamara	Padamara
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Perlunya lahan baru untuk parkir puskesmas karanganyar, karena sangat mengganggu lalu lintas pada saat pelayanan kesehatan sedang padat dan sempitnya lahan parkir yang tersedia saat ini. maka dari itu perlu di tambah lahan khusus untuk parkir.	Desa Karanganyar, Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga	Karanganyar	Karanganyar

Berdasarkan data diatas bahwa usulan musrenbang kecamatan yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berjumlah 31 usulan dengan rincian 17 usulan mengenai permintaan bantuan stimulan jamban, 8 usulan mengenai rehabilitasi / pembangunan pustu, 3 usulan rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa dan 6 usulan pengadaan alat kesehatan.

2.6 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal Neonatal dengan sistem drill baik secara mandiri oleh faskes maupun pendampingan dari dokter spesialis dan tim
2. Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar
3. Peningkatan mutu layanan puskesmas dan rumah sakit daerah.
4. Integrasi layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
5. Penguatan surveilans Kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis
6. Penguatan jaminan kesehatan

Masih adanya indikator kinerja yang belum mampu dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja dan analisis penyelesaian terhadap hambatan yang ada sehingga seluruh target yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan baik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

6.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. RPJMN 2025-2029 telah mengidentifikasi dan memetakan peran signifikan khususnya di bidang kesehatan dalam mengkoordinasikan berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, yang hamper seluruhnya berada di bawah Proritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Prioritas Nasional 4 dan berkaitan dengan kesehatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk berbasis siklus hidup mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, anak termasuk anak usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia dengan penekanan pada penguatan edukasi, peningkatan cakupan, kualitas, dan tata laksana layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat.
2. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit dengan memperkuat pencegahan dan deteksi dini faktor risiko, tata laksana kasus, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan hidup sehat, serta menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan.
3. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan diarahkan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk oenyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat.
4. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi/pendekatan khusus/modifikasi pelayanan kesehatan bagi daerah sulit akes, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan

layanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, penguatan jejaring layanan kesehatan primer berbasis tatanan, mendorong inovasi pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Induk Bidang Kesehatan, arah kebijakan Kementerian Kesehatan untuk 5 tahun kedepan yaitu *“Menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di setiap kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya”*.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut memastikan tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Pada tahun 2025-2029, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melanjutkan transformasi kesehatan, mencakup:

1. **Transformasi Layanan Primer** bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sehat di setiap siklus hidup melalui peningkatan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup dan peningkatan akses serta kualitas pelayanan primer.
2. Transformasi Layanan Lanjutan bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan lanjutan secara di Indonesia
3. Transformasi Ketahanan Kesehatan bertujuan untuk memperkuat kapasitas ketahanan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi ancaman kesehatan global maupun nasional.
4. Transformasi Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang berfokus pada peningkatan akses layanan yang adil dan terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
5. Transformasi SDM Kesehatan bertujuan untuk menjamin kecukupan dan pemerataan SDM Kesehatan yang kompeten secara proposional terhadap jumlah penduduk, termasuk di kawasan DTPK.
6. Transformasi Teknologi Kesehatan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi.

Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 terdapat 4 Prioritas Nasional yang terkait erat dengan tugas dan

fungsi Kementerian Kemendukbangga/BKKBN, yaitu: Prioritas Nasional 2 (dua), 4 (empat), dan 6 (enam).

Kemendukbangga/BKKBN mendukung Prioritas Nasional 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru” khususnya pada Program Prioritas Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi pada Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional.

Pada Prioritas Nasional (PN) 4: “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Kemendukbangga/BKKBN secara langsung berkontribusi terhadap 4 program prioritas sebagai berikut:

1. Program Prioritas Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, pada kegiatan prioritas:
 - a. Penurunan Kematian Ibu dan Anak;
 - b. Pencegahan dan Penurunan Stunting; dan
 - c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, dan Lansia serta KB dan Kespro.
2. Program Prioritas Peningkatan Ketangguhan Keluarga, pada kegiatan prioritas:
 - a. Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak;
 - b. Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga; dan
 - c. Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan.
3. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Pemuda, pada Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko.
4. Program Prioritas Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, pada Kegiatan Prioritas Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Pada Prioritas Nasional (PN) 6 dalam “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”, Kemendukbangga/BKKBN berkontribusi pada 2 (dua) program prioritas yaitu:

1. Pada Program Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif pada Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi Perawatan (*Care Economy*); dan
2. Program Prioritas Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan pada Kegiatan Prioritas Tata Kelola Pendampingan/Penyuluhan.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di atas, maka Kemendukbangga/BKKBN mengembangkan kerangka arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu “*Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas*”.

Secara detail, arah kebijakan dan strategi meliputi:

1. Bidang Pengendalian Penduduk
Meningkatkan sinergi kebijakan pengendalian penduduk secara holistik dan komprehensif dalam kerangka demografi (fertilitas, mortalitas, mobilitas, struktur penduduk, distribusi, dan kepadatan penduduk) dalam rangka mendukung upaya kapitalisasi bonus Demografi.
2. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan siklus hidup dalam mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas
3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan inklusif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran sesuai dengan siklus hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga menyelaraskan sasaran, indikator, dan program kegiatan daerah dengan lima fokus prioritas utama, yaitu: (1) penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan, (2) percepatan penurunan kasus kematian ibu, balita dan stunting, (3) pengendalian

penyakit menular dan tidak menular, (4) peningkatan kesertaan KB dan pengendalian penduduk, serta (5) pembangunan keluarga berkualitas.

Penyelarasan ini menjadi penting guna memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah mendukung pencapaian target RPJMN dan Renstra Tahun 2025–2029, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas keluarga secara berkelanjutan di daerah.

6.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah *“Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif”*. Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pembangunan bidang kesehatan, maka tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga adalah *“Terwujudnya masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas”*, dengan indikator Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Keluarga. Sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator Meningkatkan kualitas kelembagaan Dinkes, dengan nilai SAKIP Dinkes 74,31.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan, dengan indikator :
 - a. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan 87,81 point
 - b. Persentase Penurunan Kasus Kematian Ibu 10 persen
 - c. Angka Kematian Balita 14,8 per 1.000 KH
 - d. Prevalensi Stunting 21,98 persen
 - e. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) 82,61 persen
 - f. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) 13,04 persen
 - g. Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk 2,47 per 1.000 penduduk

- h. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar 94,21 persen
- 3. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang, dengan indikator Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR 2,16-2,09

6.3 Program dan kegiatan Perangkat Daerah

Indikator program yang juga tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah
2. Cakupan Fasyankes dengan status BLUD Penuh
3. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar
4. Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal paripurna
5. Jumlah kematian ibu
6. Jumlah kematian balita
7. Prevalensi wasting balita
8. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
9. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
10. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)
11. Insidensi HIV
12. Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat
13. Persentase kegiatan surveilan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta kejadian tertentu yang dilaksanakan
14. Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar
15. Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
16. Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar
17. Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan
18. Persentase Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik Cukup

Berikut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - iii. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah
 - i. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ii. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iii. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - iv. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - vi. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iv. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:

- i. Pembangunan Puskesmas
 - ii. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - iii. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - iv. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - v. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - vi. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
- i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - ii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - iii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - iv. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - v. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - vi. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - vii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - viii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - ix. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - x. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - xi. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - xii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - xiii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - xiv. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - xv. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - xvi. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - xvii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - xviii. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - xix. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - xx. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

- xxi. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - xxii. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - xxiii. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional
 - xxiv. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - xxv. Operasional Pelayanan Puskesmas
 - xxvi. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - xxvii. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - xxviii. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - xxix. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
 - xxx. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
 - xxxi. Pengelolaan kesehatan haji
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan subkegiatan:
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
- i. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - ii. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - iii. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
- i. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - ii. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota, dengan subkegiatan:
- i. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

- ii. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan subkegiatan:
 - i. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - b. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, dengan subkegiatan:
 - i. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-minuman industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
- 6. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan subkegiatan:
 - i. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
 - ii. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
 - iii. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kotaa, dengan subkegiatan:
 - i. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - ii. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - iii. Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
7. Program pembinaan keluarga berencana (KB), dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan subkegiatan:
 - i. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
 - ii. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - iii. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan subkegiatan:
 - i. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - ii. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - iii. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP

- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - i. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
- 8. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - i. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
 - ii. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
 - b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - i. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
 - ii. Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga
 - iii. Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		OPD Pengampu
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				170.420.208.000				164.222.752.000	
	Terwujudnya masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas	Usia Harapan Hidup		74,61				74,99		
		Indeks Pembangunan Keluarga		65,85-65,89				66,61-66,68		
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		87,81				88,31		
		Persentase penurunan kasus kematian ibu		9,09				10		

		Angka Kematian Balita		15,3				14,8		
		Prevalensi stunting		22,1				21,98		
		Angka populasi bebas penyakit tidak menular		82,61				86,96		
		Angka piopulasi bebas penyakit menular		13,04				17,39		
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap jumlah penduduk		2,47				2,5		
		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar		88,31				94,21		
	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR		2,16-2,09				2,16-2,09		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian		74,31				74,41		

			Penduduk dan Keluarga Berencana	Penduduk dan Keluarga Berencana								
1.02.01			A. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah		100 persen	127.651.302.000	DAU		100 persen	121.378.752.000	
				Cakupan fasyankes dengan status BLUD Penuh		96,15 persen				96,15 persen		
1.02.01.2.01			1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu		100 persen	8.500.000			100 persen	12.000.000	
1.02.01.2.01.00 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	5.000.000	DAU	Renja, DPA	3 Dokumen	8.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.01.00 07			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	5 dokumen	3.500.000	DAU	SAKIP, LKJIP, LKPJ, SPIP, Laba2	5 dokumen	4.000.000	Dinkesppkb

1.02.01.2.02			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu		100%	125.724.525.864			100%	120.174.252.000	
1.02.01.2.02.00 01			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	1.829 orang	125.890.825.000	DAU		1.829 orang	120.029.252.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.02.00 02			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purbalingga	60 Dokumen	67.378.000	DAU	Fasilitasi perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah 609 OH, 70 OH luar daerah 535 OH dalam daerah	60 Dokumen	50.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.02.00 04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purbalingga	5 dokumen	92.548.000	DAU	Honor PPTK, PPKom/ Bendahara pembant	5 Dokumen	95.000.000	Dinkesppkb

									u, Penyusu nan LKD			
1.02.01.2.03			3. Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan		100 persen	4.800.000			100 persen	5.000.000	
1.02.01.2.03.00 06			Penatausaha an Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purbalingga	1 Laporan	4.800.000	DAU	Honorari um Pejabat Pengad aan, Penguru s Barang dan penguru s barang pembant u	1 Laporan	5.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.05			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan		100%	6.000.000			100%	9.000.000	
1.02.01.2.05.00 09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Kab. Purbalingga	36 Orang	4.000.0000	DAU		36 Orang	5.000.000	Dinkesppkb

			Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan								
1.02.01.2.05.00 11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bintek perundang-undangan	Kab. Purbalingga	30 orang	2.000.000	DAU	Fasilitasi ASN untuk mengikuti Bimtek perundang-undangan	30 orang	4.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.06			5. Administrasi Umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum		100%	88.950.000			100%	62.500.000	
1.02.01.2.06.00 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	2.500.000	DAU		1 paket	3.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.06.00 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	1 paket	54.450.000	DAU		1 paket	25.000.000	Dinkesppkb

1.02.01.2.06.00 06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Dokumen	2.200.000	DAU		12 Dokumen	2.500.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.06.00 08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	12 Laporan	10.000.000	DAU		12 Laporan	10.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.06.00 09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purbalingga	25 Laporan	11.000.000	DAU		25 Laporan	12.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.06.00 11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purbalingga	9 dokumen	8.800.000	DAU	Fasilitasi untuk operator SIMDA, Operator SIMASE T	9 dokumen	10.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.07			6. Pengadaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja		100 persen	92.772.000			100 persen	35.000.000	

1.02.01.2.07.00 06				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Purbalingga	3 unit	92.772.000	DAU		3 unit	35.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08			7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang		100%	579.981.136			100%	696.000.000	
1.02.01.2.08.00 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	1 Laporan	800.000	DAU		1 Laporan	1.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.08.00 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Purbalingga	48 Laporan	311.604.000	DAU		48 Laporan	295.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.08.00 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purbalingga	12 Laporan	11.973.000	DAU	Jasa pengharum ruangan, baner, spanduk, tinta printer.	12 Laporan	12.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.08.00 04			.Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	Kab. Purbalingga	6 Laporan	418.697.000	DAU	Fasiltasi untuk	6 Laporan	388.000.000	Dinkesppkb

			Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					tenaga penunjang pemerintah daerah sejumlah 19 org			
1.02.01.2.09			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD		100 persen	816.381.000			100 persen	385.000.000	
1.02.01.2.08.00 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Purbalingga	43 unit	529.381.000	DAU	Penyediaan BBM operasional, oli dan spare part kendaraan, Pajak kendaraan bermotor,	43 unit	350.000.000	Dinkesppkb

1.02.01.2.08.00 06				Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purbalingga	40 unit	47.000.000	DAU	Pemeliharaan telepon/pabx, jaringan telepon, PC/Note book. Pemeliharaan peralatan Personal Computer, Peralatan Jaringan, dan pemeliharaan Instalasi-instalasi lain	40 unit	25.000.000	Dinkesppkb
1.02.01.2.08.00 09				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purbalingga	2 unit	240.000.000	DAU	Pemeliharaan gedung	2 unit	10.000.000	Dinkesppkb

1.02.02.	B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	78,87	41.317.859.000			78,87	41.580.000.000	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi minimal paripurna	90				91,67		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	99,5				99,5		
				Jumlah kematian ibu	9				9		
				Jumlah kematian balita	158				155		
				Prevalensi wasting balita	7,5				7		
				Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	55				60		

				Persentase desa / kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	20,92				24,74		
				Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (TSR)	93				94		
				Insidensi HIV	0,4				0,3		
				Persentase kegiatan surveilans kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana	100				100		
1.02.02.2.01			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase RS Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	88	5.560.467.000			92	10.480.500.000	

				(SPA) sesuai standar								
				Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar		85			88			
1.02.02.2.01.00 02			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Kecamatan Bukateja	1 unit	2.000.000.000	Pajak Rokok		1 unit	2.500.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.01.00 20			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / Alat peninjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kabupaten Purbalingga	100 unit	268.630.000	DAK Non Fisik	-	100 Unit	270.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.01.00 23			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis	Kab. Purbalingga	2 paket	3.288.046.000	DBHCHT, DAK Non Fisik, Pendapata		2 paket	10.200.000.000	Dinkesppkb

			Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				n Bagi Hasil Pajak Rokok				
1.02.02.2.01.00 24			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Purbalingga	250.000 Keluarga	2.500.000	DAU		250.000 Keluarga	6.000.0000	Dinkesppkb
1.02.02.2.01.00 26			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	24 Paket	1.291.000.	DAU	Bahan Repacki ng Obat	24 Paket	2.000.000	Dinkesppkb

				Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		81				82		
				Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100				100		
				Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		100				100		
				Persentase lanjut usia yang mandiri		77				79		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100				100		
				Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100				100		

				Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar		100				100		
				Persentase Depresi yang mendapat layanan		2,5				3		
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		23				22		
				Prevalensi Obesitas		22,5				22,5		
				Persentase UKK yang dibina		100				100		
				Cakupan penemuan kasus TB		96				97		
				Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar		100				100		
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat		54				58		

				Persentase penanganan KLB dan bencana kurang dari 24 jam		100				100		
				Annual Parasite Incidence (API) Malaria		<0,01				0,01		
				Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100				100		
				Persentase fasyankes yang dilakukan monitoring dan evaluasi		100				100		
				Cakupan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang dibina		100				100		
1.02.02.2.02.00 01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11.365 orang	97.217.000	DAK Non Fisik	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ANC sesuai	11.365 orang	110.000.000	Dinkesppkb

									standar (K6) dan 10T, peningkatan kapasitas bidan dan AMP			
1.02.02.2.02.0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	10.912 orang	50.800.000	DAK NF , Pendapatan bagi hasil pajak rokok	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar, transportasi ibu bersalin	10.912 orang	125.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.0003			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	10.903 orang	.1.640.443.000.	DAU, DAK Non Fisik	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal esential sesuai	10.903 orang	15.000.000	Dinkesppkb

									standar, MTBS orientasi shk			
1.02.02.2.02.00 04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	52.152 orang	11.665.000	DAU	Seiap balita mendap atkan pelayan an sesuai standar, SDITK dan Imunisa si dasar lengkap	52.152 orang	20.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	140.773 orang	43.035.000	DAU	sekolah sehat bias, CKG anak sekolah	140.773 orang	45.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Purbalingga	673.046 orang	12.890.000	DAU	Skreenin g PTM pada usia produktif kanker	673.046 orang	20.000.000	Dinkesppkb

				Kesehatan Sesuai Standar					leher rahim			
1.02.02.2.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	132.801 orang	5.820.000	DAU	Pendampingan Cargiver	132.801 orang	15.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	34.998 orang	8.200.000	DAU	Pembinaan berhenti merokok dan KTR	34.998 orang	15.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.0009			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	11.666 orang	1.600.000	DAU	Gerakan pengendalian DM	11.666 orang	10.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.0010			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Purbalingga	2.671 orang	3.766.000	DAU	Refreshing pengelola kes	2.671 orang	6.000.000	Dinkesppkb

			Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					jiwa puskesmas			
1.02.02.2.02.00 11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	13.437 orang	2.278.965.000	DAU, DAK NF	Target Eliminasi TBC th 2030	13.437 orang	100.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	14.985 orang	109.540.000	DAU, DAK NF	Target Three Zero Th 2030	14.985 orang	185.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Purbalingga	4 Dokumen	30.160.000	DAU	Surveilans gizi, PKMK balita, pengadaan iodine tes	4 Dokumen	280.000.000	Dinkesppkb

1.02.02.2.02.00 16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Purbalingga	2 Dokumen	26.315.000	DAU	UKK, Sitko, K3 Fasyankes	2 Dokumen	50.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Purbalingga	4 Dokumen	1.837..916.000	DAK NF, Pendapatan Bagi hasil Pajak Rokok	STBM, TPP, TFU, KKS	4 Dokumen	175.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Purbalingga	6 Dokumen	141.990..000	DAK Non Fisik	Gerakan cegah stunting, akzi bergizi, dll		300.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Purbalingga	4 Dokumen	3.680.000	DAU		4 Dokumen	6.000.000	Dinkesppkb

1.02.02.2.02.00 20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Purbalingga	12 Dokumen	97.735.000	DAU, DAK NF		12 Dokumen	250.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 21			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	1.586 orang	7.045.000	DAU		1.586 orang	10.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 22			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purbalingga	27 orang	4.100.000	DAU	Skrining jiwa di sekolah	27 orang	8.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Purbalingga	10 Dokumen	489.605.000	DAK NF, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Roko	program penyakit menular dan tidak menular lainnya : malaria, kusta, diare, Hepatitis , lspa,	10 Dokumen	270.000.000	Dinkesppkb

									DBD, Leptospirosis, Filariasis, Asma, Decomp cordis, Ginjal			
1.02.02.2.02.00 26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Purbalingga	12 Dokumen	26.590.674.000	Pajak rokok, DAU, DBHCHT	Iuran JKN maskin, bantuan iur JKN	12 Dokumen	27.000.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 28			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Purbalingga	4.669 paket	670.600.000	DAK NF	Pengirim an sampel	4.669 paket	425.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 32			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Purbalingga	9 Dokumen	4.608.000	DAU	8 RS	9 Dokumen	5.000.000	Dinkesppkb

1.02.02.2.02.00 33			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purbalingga	23 Dokumen	707.200.000	Pendapata n bagi hasil pajak rokok		23 Dokumen	1.000.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 36			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Purbalingga	12 Laporan	3.830.000	DAU		12 Laporan	6.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 38			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Purbalingga	1 Unit	253.930.000	DAU		1 unit	255.000.000	Dinkesppkb

1.02.02.2.02.00 42			Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan malaria	Kab. Purbalingga	1.749	32.801.000	DAK NF		1.749	34.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 46			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Purbalingga	3 dokumen	191.651.000	DAK NF		3 Dokumen	340.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.02.00 50			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan haji	Kab. Purbalingga	1 dokumen	18.000.000	DAU		1 Dokumen	20.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.03.			3. Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional		52 Persen	45.210.000			55 Persen	45.000.000	
1.02.02.2.03.00 02			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Purbalingga	1 Dokumen	45.210.000	DAU		1 Dokumen	45.000.000	Dinkesppkb

1.02.02.2.04.		4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin		100 Persen	134.286.000			100 Persen	14.000.000	
1.02.02.2.04.00 01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Purbalingga	51 unit	3.750.000	DAU		51 unit	4.000.000	Dinkesppkb
1.02.02.2.04.00 02		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola	Kab. Purbalingga	56 unit	5.000.000	DAU		56 unit	6.000.000	Dinkesppkb

				Sesuai Standar								
1.02.02.2.04.00 03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	60 unit	125,536.000	DAU, DAK NF		60 unit	4.000.000	Dinkesppkb
1.02.03.		C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar		88,93	768.106.00			89,33	792.000.000	
				Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		100				100		
1.02.03.2.01.		1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjalankan praktik di fasilitas		93 persen	200.179.000			94 persen	9.000.000	

				elayanan kesehatan								
1.02.03.2.01.00 01			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	3.250.000	DAU	150 dokumen	150 dokumen	4.000.000	Dinkesppkb
1.02.03.2.01.00 02			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	93 dokumen	2.010.000	DAU		93 dokumen	5.000.000	Dinkesppkb
1.02.03.2.03.			3. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan		100 persen	81.906.000			100 persen	83.000.000	

1.02.03.2.03.00 02			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Purbalingga	2.098 orang	6.795.000	DAU		2.098 orang	7.000.000	Dinkesppkb
1.02.03.2.03.00 03			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purbalingga	5 dokumen	193.384.000	DAU, DAK NF		5 dokumen	76.000.000	Dinkesppkb
1.02.03.2.03.			4. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan		100 Persen	829.130.000			100 Persen	700.000.000	
1.02.03.2.04.00 01			Pengembang an Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	214 orang	829.130.000	DAK NF	Pelatiha n yg diseleng garakan dlm	214 orang	700.000.000	Dinkesppkb

			Sumber Daya manusia	yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					rangka meningkatkan kompetensi SDM kesehatan			
1.02.04.			D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar		100 persen	361.531.000			100 persen	327.000.000	
				"Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan"		63,29 persen				77,78 persen		
1.02.04.2.01.			1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		100 Persen	10.000.000			100 Persen	7.000.000	
1.02.04.2.01.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Kab. Purbalingga	80 Dokumen	60.254.000	DAK POM		80 Dokumen	7.000.000	Dinkesppkb

			Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
1.02.04.2.03.			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		32,59 Persen	133.540.000			38,39 Persen	130.000.000	
1.02.04.2.03.00 01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	55 Dokumen	133.540.000	DAK POM		55 Dokumen	130.000.000	Dinkesppkb

			Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
1.02.04.2.01.			1. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu		91,18 Persen	167.737.000			91,18 Persen	190.000.000	
1.02.04.2.06.00 01			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-	Kab. Purbalingga	124 Unit	167.737.000	DAK POM		124 Unit	190.000.000	Dinkesppkb

			Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan								
1.02.05.		E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik Cukup		90 %	54.947.000			91 %	145.000.000	
1.02.05.2.01.		1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif		100 persen	25.661.000			100 persen	35.000.000	
1.02.05.2.01.00 01			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdaya	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purbalingga	4 Dokumen	25.661.000	DAU	Pengad aan 5 Mobil siaga desa dan siaran radio, Strata	4 Dokumen	35..000.000	Dinkesppkb

			an Masyarakat						DSM, Pembinaan KTR			
1.02.05.2.02.			2. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Sehat		95,46 persen	26.986.000			95,84 persen	40.000.000	
1.02.05.2.02.0001			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purbalingga	5 Dokumen	26.986.000	DAU	Strata PHBS, Strata UKS, Germas, ILP, Media Promkes	5 Dokumen	40.000.000	Dinkesppkb
1.02.05.2.03.			3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Persentase UKBM yang dilakukan bimtek dan supervisi		79 %	68.730.000		Tahun 2026 100 desa, tahun 2026 110 des	79,5%	70.000.000	

			Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.05.2.03.00 01			Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembang an Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	68.730.000	DAU, DAK NF	Pembina an poskestr en, Pokjandal posyand u	3 Dokumen	70.000.000	Dinkesppkb
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.280.247.000				5.734.457.000	
2.14.02			Program Pengendalian Penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MKUP) (%)		21 Tahun	234.900.0000			21,3 Tahun	257.299.000	
2.14.02.2.01			- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan	Persentase terpenuhinya Program Bangga Kencana (%)		100	9.920.000			100	20.711.000	Dinkesppkb

			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
2.14.02.2.01.16			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kabupaten Purbalingga	1 Kegiatan	3.957.000	DAU		1 Kegiatan	4.352.000	Dinkesppkb
2.14.02.2.01.17			Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kabupaten Purbalingga	1 Kegiatan	2.400.000	DAU		1 Kegiatan	2.520.000	Dinkesppkb
2.14.02.2.01.23			Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	Kabupaten Purbalingga	4 Kegiatan	3.563.000	DAU		4 Kegiatan	3.919.000	Dinkesppkb

				dan Keluarga Berencana)								
2.14.02.2.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang melaksanakan pengolahan data dan pelaporan		100	224.980.000			100	236.588.000	
2.14.02.2.02.12			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kabupaten Purbalingga	18 Laporan	143.400.000	DAU		18 Laporan	150.570.000	Dinkesppkb
2.14.02.2.02.13			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Purbalingga	12 Dokumen	74.400.000	DAU		12 Dokumen	78.120.000	Dinkesppkb
2.14.02.2.02.27			Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kabupaten Purbalingga	2 Dokumen	7.180.000.000	DAU		2 Dokumen	7.898.000	Dinkesppkb

			Keluarga Berencana (Bangga Kencana)									
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (%)		1,40	1.935.604.000			1,40	2.421.096.000	
2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun		19,2	855.288.000			18,9	871.096.000	
2.14.03.2.01.10			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kabupaten Purbalingga	18 Laporan	799.200.000	DAU		18 Laporan	673.200.000	Dinkesppkb

2.14.03.2.01.13			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kabupaten Purbalingga	3 Dokumen	16.088.000	DAU		3 Dokumen	17.696.000	Dinkesppkb
2.14.03.2.01.14			Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kabupaten Purbalingga	1 Organisasi	40.000.000	DAU		1 Organisasi	180.000.000	Dinkesppkb

2.14.03.2.02			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase laporan kegiatan kader PKB/PLKB (%)		100	179.250.000			100	1.550.000.000	
2.14.03.2.02.00 04			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Purbalingga	1.813	179.250.000	DAU		1.813	1.550.000.000	Dinkesppkb
2.14.03.2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (%)		90,01	848.566.000			90,2	1.362.090.000	
2.14.03.2.03.00 01			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Kabupaten Purbalingga	12 Laporan	86.400.000	DAU		12 Laporan	58.590.000	Dinkesppkb

			Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya	Jaringan dan Jejarungnya								
2.14.03.2.03.00 03			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Purbalingga	15.000 orang	758.846.000	DAU		15.000 orang	1.300.000.000	Dinkesppkb
2.14.03.2.03.00 04			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Purbalingga	3 Dokumen	3.320.000	DAU		3 Dokumen	3.500.000	Dinkesppkb
2.14.03.2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Proporsi Kampung KB Mandiri (%)		0,84	52.500.000			0,84	60.000.000	

			Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
2.14.03.2.04.00 05			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kabupaten Purbalingga	7 Unit	52.500.000	DAU	7 Unit	60.000.000	Dinkesppkb
2.14.04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif (%)		62,99	5.109.743.000		63	3.056.062.000	
				Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan (%)		62,99			63		
2.14.04.01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) (%)		83,68	10.055.000		83,82	10.822.000	

			Kesejahteraan Keluarga									
2.14.04.01.0017			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Purbalingga	1 Laporan	4.760.000	DAU		1 Laporan	4.998.000	Dinkesppkb
2.14.04.01.0021			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Kabupaten Purbalingga	1 Laporan	5.295.000	DAU		1 Laporan	5.824.000	Dinkesppkb

			PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Ekonomi Keluarga/UPPKA)								
2.14.04.2.02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga		100	5.099.688.000			100	3.071.956.000	
2.14.04.2.02.0006			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kabupaten Purbalingga	769	5.075.400.000	BOK-KB		769	3.045.240.000	Dinkesppkb

			n, Baduta/Balita)	yang mendapat pendampingan								
2.14.04.2.02.00 07			Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarak atan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembanguna n Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Purbalingga	3 Laporan	7.538.000	DAU		3 Laporan	8.291.000	Dinkesppkb
2.14.04.2.02.00 08			Promosi dan Sosialisasi Program Pembanguna n Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Purbalingga	1 Laporan	16.750,000	DAU		1 Laporan	18.425.000	Dinkesppkb
				TOTAL			177.700.455.000				169.957.209.000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dokumen ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Dalam penyusunannya, Renja ini juga telah memperhatikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dapat memberikan manfaat yang adil, setara, dan responsif bagi laki-laki dan perempuan, serta kelompok rentan lainnya.

Renja ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik internal perangkat daerah maupun lintas sektor terkait. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, pengendalian, serta evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA

dr. JUSI FEBRIANTO, MPH
Pembina Tk I
NIP. 19700219 200212 1 004